

Kita meyakini jika Pancasila dipedomani sebagai dasar negara, bangsa Indonesia

akan hidup dalam rukun dan harmonis serta terwujud cita-cita nasional: masyarakat yang sejahtera, adil, dan

makmur. The World a New )





## Pancasila <mark>Sebagai</mark> Karakter Bangsa

(Bagian 2)

ima sila dalam Pancasila

dari nilai-nilai luhur vang

ada dan berkembang dalam diri

bangsa Indonesia sendiri. Apa

bangsa yang religious (religious

state). Apapun agamanya, mas-

varakat Indonesia merupakan

masvarakat vang religius, Indo-

nesia memang bukan negara

agama, tapi Indonesia adalah

negara dan bangsa yang

siaan yang beradab.

nilai-nilai identitas itu:

diambil/disusun/disarikan

Pertama, Indonesia adalah

mempertemukan satu dengan yang lainnya. Kita boleh berbeda. Ada elemen-elemen

lokal, tetapi selalu ada benang

merah yang menyatukan kita.

Seperti itulah filosofi dari Bhineka Tunggal Ika. Keempat, di seluruh Nusantara, bangsa ini memiliki tradisi musyawarah dalam segala urusan. Sila keempat dengan baik menggambarkan ciri khas demokrasi Indonesia.

Empat unsur tersebut pada akhirnya kembali dipersatukan dengan cita-cita dan impian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya, di manapun kita berada, baik di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, atau lainnya, kita dipersatukan dengan impian masyarakat yang adil makmur, tentram raharja.

Pancasila dilahirkan dari pergulatan pemikiran tokoh tokoh pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Perdebatan konseptual rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan tiga hal:

Pertama, Pancasila menunjukkan kualitas pemikiran (isi kepala) bangsa kita. Bangsa dengan kebhinekaan yang besar harus dibangun dengan konsepsi yang kuat untuk menjaga kebesarannya. Tanpa konsepsi itu bangsa kita sudah lama tercerai berai dalam kesukuan dan kedaerahan.

Kedua, Pancasila menunjukkan kualitas peradaban bangsa Indonesia dengan karakternya yang unggul. Pun demikian, Pancasila sejatinya bukan saja milik bangsa Indonesia, tapi bisa diwariskan untuk dunia sebagaimana Pidato Bung Karno yang mengguncang dunia di Sidang Umum PBB 30 September 1960 tentang Pancasila (To Build

Ketiga, dan ini yang sangat penting, rumusan Pancasila menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati tokoh bangsa untuk menjaga persatuan di atas semua kepentingan golongan.

Dengan refleksi atas lahirnya Pancasila tersebut, apa sikap sikap dan perilaku kebangsaan yang tepat kita hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini?

Pertama, Pancasilatelah final sebagai falsafah dan norma dasar beregara (dasar negara). Tugas kita mengokohkan dan mengaktualisasikan niai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

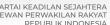
Kedua, menjadikan Pancasila milik bersama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang terbuka. Seluruh warga negara aman dan nyaman mengekspresikan nilai nilai Pancasila. Ketiga, menjadikan Pancasila alat pemersatu, bukan alat pemecah-belah, segregasi, dan alienasi warga negara.

Keempat, mengedepankan sikap toleransi (tasammuh), silaturahim, kerjasama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian, dan yang demikian tidak lah mungkin bisa dilakukan.

Kita meyakini jika Pancasila dipedomani sebagai dasar negara, bangsa Indonesia akan hidup dalam rukun dan harmonis serta terwujud citacita nasional: masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. The World a New).

beragama. Kedua, karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal, yang menghormati hak-hak kemanu-

Ketiga, walaupun Indonesia mempunyai keragaman, namun dalam setiap keragaman tersebut terdapat tenunan dan jalinan yang saling







#### Menyapa Indonesia di Provinsi NTT, Dr. Salim: Cintai Negeri, Jaga NKRI, Sejahterakan Rakyat



Dr. Salim

Menvapa Indonesia

Flores (12/09) --- Ketua Maielis Svuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri mengunjungi Pulau Flores dalam Program Dr. Salim Menyapa Indonesia Provinsi NTT 11-15 Sept 2022.

Dr. Salim dijadwalkan melaksanakan berbagai kegiatan dan bertemu dengan berbagai tokoh lintas agama. adat budaya, perempuan. pemuda, nelayan dan masyarakat pesisir serta kader dan simpatisan PKS.

Setibanya di Pulau Flores. Dr. Salim vang didampingi Presiden PKS Ahmad Svaikhu dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini serta jajaran DPP dan DPW PKS NTT menggelar acara Dialog Kebangsaan bersama Tokoh Lintas Agama. Adat dan Profesi di Hotel Green Prundi Labuan Bajo (Minggu Sore, 11/9). Hadir dalam acara ini dan memberikan sambutan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Dr. Salim menyatakan kekagumannya terhadap keramahan dan kehangatan

masyarakat Flores. Apalagi disambut dengan prosesi adat vang maknanya sangat dalam.

"Sava datang ke sini seperti pulang kampung, Luar biasa penyambutannya, warganya ramah dan wajah-wajahnya penuh senyum. Ini menandakan kita satu bangsa bahkan satu keluarga," ungkap Dr. Salim.

Sebagai wilayah yang menjadi destinasi pariwisata nasional Pulau Flores khususnya Manggarai Barat menyimpan pesona yang luar biasa dan menarik banyak sekali wisatawan asing maupun domestik.

"Benar adanya Manggarai Barat bukan lagi milik NTT atau Indonesia, bahkan sudah milik dunia." kata Salim.

"Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo, Pulau Komodo, sebagai destinasi

wisata meniadi waiah Indonesia, Keindahan alam digabungkan dengan budaya masyarakat yang ramah dan hangat menjadi magnet yang membuat siapapun yang datang pasti ingin kembali lagi," ujar Dr. Salim.

#### PKS Milik Semua

PKS, lanjut Dr. Salim, juga ingin menjadi seperti Pulau Flores dengan seluruh keindahannya. PKS ingin meniadi milik seluruh rakvat Indonesia dan bekeria untuk seluruh rakyat Indonesia apapun latar agama, suku, budaya dan golongannya. PKS siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat di Flores NTT

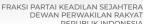
Menteri Sosial RI 2009-2014 ini tak henti mengajak elemen bangsa untuk mensyukuri keindonesiaan yang meskipun memiliki tingkat keanekaragaman dan kebhinnekaan yang begitu besar namun tetap harmonis dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Selengkapnya kunjunggi fraksi.pks.id



Dr. SALIM

"Bangsa Indonesia ini luar biasa besar. Ada 17.508 pulau, 1300 suku bangsa, 715 bahasa, 6 agama, tetapi bangsa ini hidup rukun dalam persatuan. Kalau keberagaman itu ada di negara lain belum tentu bisa bersatu. Mengapa demikian karena kita memiliki local wisdom yaitu keramahan dan kesantunan."







## **Dialog Lintas Agama** di NTT, Dr Salim Terima **Aspirasi Pembangunan Tempat Agama**



Dr. Salim

Menyapa Indonesia

Labuhan Baio (11/09) --- Ketua Maielis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al Jufri mengunjungi Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedatangan Salim Segaf untuk dialog tokoh, lintas agama dan juga memberikan sejumlah bantuan ke warga di Manggarai.

Kedatangan Salim Segaf disambut prosesi penyambutan tamu khas budaya Manggarai yakni sebuah kendi dan seekor ayam

Menurut warga setempat, kendi menandakan penyambutan tuan rumah atas tamunya yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga mungkin merasa haus, panas dan butuh kesejukan. Sementara ayam putih bermakna ketulusan sang tuan rumah dalam menyambut dan memuliakan tamunya.

Salim Segaf Aljufri menerimanya dengan sukacita, dan menyatakan kesenangannya atas sambutan tersebut dan menyatakan apresiasinya atas

budaya bangsa Indonesia.

Salim lantas bertolak menuju acara dialog dan temu tokoh masyarakat Manggarai Barat dan berdialog bersama tokoh lintas agama dan budaya yang juga dihadiri Bupati Manggarai Barat.

Dalam penyampaiannya dihadapan peserta, Salim sampaikan kebahagiaannya bisa hadir di Labuan Bajo dan menyatakan kunjungan kali ini sebagai kunjungan yang spesial.

"Istri sava pun ikut. padahal biasanya ngga pernah mau ikut," guraunya disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Dalam dialog yang

berlangsu-ng, beberapa tokoh masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi yang diharapkan dapat diperjuangkan oleh PKS.

Diantaranya usulan agar di setiap sekolah dibuatkan tempat beribadah bagi para siswa agar sebagaimana dalam lagu indonesia Raya, kita harus membangun bangsa ini jiwa dan badannya, jasmani dan rohani agar bangsa ini semakin kuat.

Aspirasi ini langsung ditanggapi dengan memerintahkan para anggota legislatif PKS untuk memperjuangkan hal tersebut

"Mendukung para kepala daerah apabila sudah berialan agar terus ditingkatkan dan semakin berhasil," tegas Salim.

Selain itu, pria yang baru didaulat sebagai Ketua Persatuan Ulama Dunia ini menegaskan agar setiap pihak menjaga dan menguatkan prinsip Bhineka Tunggal Ika, bahwa kita semua adalah satu meski berbeda beda.

"Kita adalah satu keluarga. Seorang pemimpin seperti ayah dan warganya ibarat anak



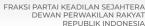
Dr. SALIM Ketua Maielis Svuro PKS

"Mendukung para kepala daerah apabila sudah berjalan agar terus ditingkatkan dan semakin berhasil. Kita adalah satu keluarga. Seorang pemimpin seperti ayah dan warganya ibarat anak anaknya. Seorang pemimpin seperti ayah akan selalu menyayangi anaknya,"

anaknya. Seorang pemimpin seperti avah akan selalu menyavangi anaknya." ielas Salim.

Di kesempatan yang sama. PKS menyampaikan bantuan

200 seng untuk pembangunan rumah Gendang Ndori sebagai bentuk perhatian PKS khususnya kepada warga di Manggarai.









Presiden PKS Kunjungi Pulau Messah NTT,

#### **Masyarakat Ucapkan** Terimakasih karena **Tolak BBM Naik**



Pulau Messah-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan kunjungan ke Pulau Messah, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat setempat, pada Sabtu (10/9/2022).

"Pagi ini saya menyebrang ke pulau Messah ditemani Ketua BPW Bali Nusra, Johan Rosihan, jajaran pengurus DPW dan DPD PKS serta anggota DPRD dari PKS, kami disambut puluhan perahu nelavan berbendera PKS yang mengawal kedatangan kami," kata Syaikhu.

Sampai di pulau tujuan, Svaikhu disambut tarian khas Suku Bajo dengan atraksi pedang tangan.

"Antusiasme warga pulau berpenduduk dua ribuan jiwa tersebut sungguh luar biasa, dermaga kecil padat terisi warga yang menyambut dan menyalami, atraksi tarian silat khas suku Bajo ditampilkan dengan pedang di tangan. Kami juga dipasangkan kain ikat di

pinggang kami lalu menyapa warga di sepanjang perjalanan kami menyusuri jalan," ucap Syaikhu.

Dalam pertemuan dengan warga Pulau Messah, ia menyebut banyak mendengar keluhan warga atas kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.

"Beberapa hal penting yang kami catat adalah kebutuhan mendesak warga atas perahu ambulan, selain itu tentu juga keluhan warga atas kenaikan harga BBM yang semakin memberatkan nelavan sampai harus membeli solar 10 ribu per liter," kata dia

Selain mendengar keluhan, Syaikhu mengatakan PKS mendapat apresiasi karena sikapnya yang menolak kenaikan harga BBM.

"Kami juga mendapat apresiasi dari warga atas kinerja PKS di parlemen, bahkan saya menerima beberapa warga yang mengaku ingn dan telah bergabung meniadi kader PKS setelah melihat kinerja PKS di parlemen dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakvat, kepada mereka sava menghadiahkan topi dan iaket sava sendiri sebagai tanda terimakasih atas kesediaannya bergabung," beber Syaikhu.

"Ada seorang ibu mendekati dan mengajak mengobrol soal kenaikan harga BBM yang sangat berdampak pada kehidupan warga, khususnya nelayan. Ibu tersebut berterimakasih kepada PKS karena meniadi satu satunya vang menolak kenaikan harga BBM di DPR." pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden PKS juga menyalurkan 170 bantuan sembako yang diserahkan kepada para lansia dan warga kurang mampu.



#### H. AHMAD SYAIKHU Presiden PKS

"Antusiasme warga pulau berpenduduk dua ribuan jiwa tersebut sungguh luar biasa, dermaga kecil padat terisi warga yang menyambut dan menyalami, atraksi tarian silat khas suku Bajo ditampilkan dengan pedang di tangan. Kami juga dipasangkan kain ikat di pinggang kami lalu menyapa warga di sepanjang perjalanan kami menvusuri ialan."









#### Kenaikan Harga BBM Siang Bolong, Aleg PKS: Pemerintah Zhalim!



Jakarta (03/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi langsung merespon kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan pemerintah pada Sabtu, (03/09) siang.

Nurhasan mengaku heran dan geram atas pengumuman kenaikan harga BBM oleh Pemerintah pada Sabtu pukul 13 30 WIR

Anggota Komisi VII ini beranggapan bahwa kebijakan tersebut menggambarkan betapa kacaunya pola pikir Pemerintah

"Kenaikan ini bukan hanya berdampak pada inflasi yang akan bergerak naik dan terus meninggi, tetapi juga akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia, Zhalim!, tegas Nurhasan.

Nurhasan menambahkan apa yang dilakukan Pemerintah ini seperti mimpi buruk di siang bolong.

"Ironisnya presiden berkalikali mengatakan akan menjaga agar BBM utamanya BBM Penugasan bersubsidi tidak akan naik, ini PHP," ungkap Nurhasan.

Nurhasan mengaku pihaknya punya catatan bahwa paling tidak 7 kali dimasa presiden sekarang BBM naik.

"Pahitnya kenaikan hari ini saat masyarakat baru akan bangkit dari imbas Pandemi dan ancaman inflasi tanpa kenaikan BBM pun sedang menghantui," tandas Anggota DPR asal Dapil Jawa Barat ini.

"Berkali-kali kita menyadarkan dan beri pemahaman Pemerintah di ruang sidang atau diskusi terbatas, tapi yang terjadi pemerintah seperti kehilangan arah prioritas dan keberpihakannya pada rakyat. Ini catatan kelam kabinet diakhir masa jabatannya, biar rakyat yang menilai," pungkasnya.

Nurhasan melanjutkan, pihaknya sangat memahami bahwa pemerintah hari ini terbebani dengan subsidi BBM dari APBN yang cukup besar, tapi bukan begini caranya.

"Masih banyak alternatif solusi yang bisa diambil, jangan rakyat yang jadi korban, ini bahaya karena jelas BBM saat ini jadi penyebab utama naiknya harga komoditas lainnya," tutup Nurhasan.





H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

"Berkali-kali kita menyadarkan dan beri pemahaman Pemerintah di ruang sidang atau diskusi terbatas, tapi yang terjadi pemerintah seperti kehilangan arah prioritas dan keberpihakannya pada rakyat. Ini catatan kelam kabinet diakhir masa jabatannya, biar rakyat yang menilai."





#### Legislator PKS: Kenaikan BBM Berpotensi Perlambat Pemulihan Perekonomian Desa



Lampung Utara (08/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly berharap pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pembangunan desa khususnya dalam pemulihan perekonomian desa.

Hal tersebut diungkapkan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (06/09/2022).

Guna mendukung pemulihan perekonomian desa, Anggota Komisi XI ini meminta keberlanjutan dan efektivitas peran BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan memperjelas detail informasi terkait batasanbatasan pengelolaan dana desa.

"Untuk itu kedua institusi ini urgensi melanjutkan kontribusinya untuk memastikan pelbagai programprogram pembangunan desa termasuk pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Junaidi.

Anggota Legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan tantangan pemulihan perekonomian di desa kini semakin tertekan ketika Pemerintah telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Jika salah memitigasi dikhawatirkan bukan saja memperlambat pemulihan ekonomi desa, namun meningkatkan kemiskinan di pedesaan," pungkasnya.

Menurut Junaidi, semestinya pemulihan ekonomi desa yang masih berjalan ini perlu didukung dengan stabilitas ekonomi, namun yang terjadi masyarakat kini dihadapkan pada kenaikan pelbagai kebutuhan bahan pokok dan transportasi masyarakat pedesaan sebagai implikasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Upaya meningkatkan pembangunan perekonomian desa perlu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh termasuk memperdalam keberpihakan nyata dari pemerintah," tutup Junaidi.





KH. AUS HIDAYAT NUR

"Tantangan pemulihan perekonomian di desa kini semakin tertekan ketika Pemerintah telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Jika salah memitigasi dikhawatirkan bukan saja memperlambat pemulihan ekonomi desa, namun meningkatkan kemiskinan di pedesaan





#### Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Politisi PKS: Jangan Buat Rakyat Makin Susah



Jakarta (06/09) — Anggota DPR RI dari Faksi PKS, Junaidi Auly menyayangkan sikap pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa pertalite dan solar.

Hal ini resmi diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada konferensi pers di istana negara hari Sabtu, 03 September 2022 yang lalu.

Junaidi mengatakan bahwa Kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Kebutuhan bahan pokok yang juga ikut melonjak harganya beberapa waktu lalu, menambah berat beban masyaratakat.

"Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng naik, harga telur juga ikut naik. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi ini", kata Junaidi.

Putra kelahiran Lampung ini mengatakan, akan terjadi efek yang luas di sektor lainnya akibat dari naiknya harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.

"Naiknya harga BBM ini pasti lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita yg berprofesi sebagai tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya. Mereka

akan menjerit, terpukul ekonominya dan bisa jadi sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi", ungkap Junaidi.

Junaidi menambahkan, pasti masih ada cara lain untuk kita memperbaiki semua ini, jangan kemudian kebijakan-kebijakan yang kita buat justru makin membuat masyarakat tertekan dan susah akibat dampak pandemi yg belum usai.





Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

"Naiknya harga BBM ini pasti lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita yg berprofesi sebagai tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya. Mereka akan menjerit, terpukul ekonominya dan bisa jadi sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi"





#### Legislator PKS: Kebijakan Tarik Subsidi BBM oleh **Pemerintah Kontraproduktif**



Jakarta (05/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati memberi catatan atas keputusan pemerintah menaikan BBM bersubsidi.

"Momennya sangat tidak pas, ketika perkonomian sedang bergerak pada pemulihan, bukan distimulus tapi malah dihambat, kebijakan yang kontraproduktif" katanya di kompleks DPR RI. Senavan. Jakarta (05/09).

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini pada saat yang sama kondisi geo-politik perang Rusia-Ukraina, membuat perekonomian global semakin tidak pasti karena ancaman inflasi tinggi.

" Padahal masyarakat butuh waktu untuk kembali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi vang tidak stabil seperti saat ini." katanya.

Menurut Anis, kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja, tapi iuga ke hampir semua sektor ekonomi akan terdampak. terutama sektor vang berhubungan dengan

masvarakat secara umum.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan semakin mendekatkan perekonomian nasional pada kondisi triple horror vang sangat mengkhawatirkan, akan terjadi efek berantai dalam perekonomian.

"Tekanan inflasi tinggi. naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat produsen meningkat, sehingga harga jual ke konsumen akan ikut naik, diperkirakan angka inflasi akan mencapai 7.0-8.0 persen hingga akhir tahun 2022." uiarnya.

Aleg Perempuan FPKS ini menerangkan bahwa suku bunga tinggi, pasca kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi umum diperkirakan menembus di level 7.0 - 8.0 persen hingga akhir tahun.

"Kondisi ini memicu

kenaikan suku bunga secara agresif, kondisi ini akan membuat biava ekspansi rumah tangga dan dunia usaha meniadi lebih mahal." serunya.

Menurutnya, tingginya inflasi dan tingkat suku bunga, sudah pasti menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan melambat Aktivitas ekonomi vang sudah mulai bergulir semenjak awal tahun 2022, bisa dipastikan akan melambat, seiring dengan tingginya biaya ekspansi usaha dan beban hidup masyarakat.

"Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan kembali melambat. 10 Menambah Angka Kemiskinan dan Pengangguran," tuturnya.

Legislator PKS ini menyatakan bahwa kebijakan tarik subsidi Solar dan Pertalite, dipastikan akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Kebijakan Pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

"Kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja, tapi juga ke hampir semua sektor ekonomi akan terdampak, terutama sektor yang berhubungan dengan masyarakat secara umum"

sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banvak membantu," ujarnya

Menurut Anis alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya.

"Besar kemungkinan pada akhir tahun 2022, angka kemiskinan dan pengangguran akan kembali meningkat," tutup Anis.





## Naiknya Harga BBM, **Bukti Pemerintah secara** Sistematis Hapus Subsidi dan Menjerat Rakyat



Balikpapan (08/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur mengaku prihatin dengan kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Aus, apa yang dilakukan Pemerintah sangat tidak peka dengan apa yang dialami kebanyakan rakvat Indonesia

"Pada saat Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, Saya sedang berada di Daerah Pemilihan. Balikpapan - Kalimantan Timur saat siang menielang sore pukul 14.30 WIB (di Kaltim sudah pukul 15.30 WITA) Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minvak (BBM), Sore harinva sava mampir ke sebuah warung makan di daerah Sepinggan, berjumpa para guru dan pembina pramuka, juga para Ketua RT. Semuanya sama, mengeluhkan kenaikan harga BBM." papar Aus.

Apalagi, lanjut Aus, dengan masyarakat pedalaman

Kalimantan Timur yang aksesnya menggunakan transportasi air memerlukan bensin, tentu akan lebih semakin menderita.

"Padahal baru saja kita memperingati HUT ke-77 RI, dan pemerintah mengusung tema 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat'. Kalau harga BBM hari ini dinaikkan, padahal baru saja keluar dari bulan kemerdekaan Agustus, tentu tema kemerdekaan itu tak lagi relevan. Bagaimana mau pulih lebih cepat, kalau hari ini ekonomi rakvat semakin teriepit dengan harga-harga yang perlahan melambung akibat naiknya harga BBM? Bagaimana kita akan bangkit lebih kuat. kalau hidup masyarakat semakin dipersulit?." tanva Anggota DPR RI asal Dapil Kalimantan Timur ini.

Pemerintah, lanjut Aus. sungguh tega dan tak mau mendengar suara rakvat.

"Kami di Fraksi PKS telah menyuarakan dengan lantang penolakan terhadap kenaikan harga BBM sedari awal, Bukan hanya menolak, kami pun menyampaikan kejanggalan kebijakan ekonomi pemerintah dan memberi masukan secara rasionalitas agar harga BBM tidak dinaikkan, Tapi pemerintah seakan tuli, tak mau mendengar aspirasi masyarakat yang memohon agar harga BBM tidak dinaikkan," tandasnya.

Bagi masyarakat Kalimantan Timur, laniut Aus. kenaikan harga BBM ini sesungguhnya lebih menyakitkan lagi. Pasalnya Kalimantan Timur merupakan wilayah penghasil BBM, maka akan sangat aneh bila harga BBM meniadi beban masyarakatnya.

"Sungguh miris, masyarakat di daerah yang kaya minyak bumi harus mengalami kenaikan aneka ragam harga terutama sembako karena naiknya harga BBM. Itu seperti tikus mati di lumbung padi,"



**KH. AUS HIDAYAT NUR** Anggota Komisi II DPR RI

"Penghapusan subsidi BBM ini sangat sistematis, dan ujungnya membuat rakyat semakin terjerat. Masih hangat diingatan kita, dahulu pemerintah memulai dengan pengurangan jumlah premium."

pungkasnya.

Pemerintah, lanjutnya, kemudian mengatakan akan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itu hanya akalakalan pemerintah.

"Kenaikan harga BBM sudah pasti akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang lainnya. Sementara BLT belum tentu meniadi solusinya. Buat apa ada BLT, kalau pengeluaran masyarakat pun bertambah?Lagi pula, bukan-

kah pengalaman sebelumnya. BLT rawan diselewengkan untuk kepentingan partai berkuasa? Bahkan sebelum kenaikan harga BBM diumumkan. pemerintah pun menggunakan data vang tidak akurat untuk menggantikan besaran subsidi dengan BLT. Jadi, ada maksud apa mengganti subsidi dengan BLT?," ujar Aus mempertanyakan.

Selengkapnya kunjunggi fraksi.pks.id





#### Tolak Kenaikan BBM, Aleg PKS: Kasihan dan Sangat Memberatkan Masyarakat!



Legislator asli putra Kabupaten Bone ini mengatakan, adanya demonstrasi di sejumlah daerah ini terkait keresahan yang dirasakan masyarakat.

Jakarta (08/09) — Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin (AAP) dengan tegas menolak adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Penegasan tersebut ditunjukkan dengan kompaknya Legislator Fraksi PKS yang walk out saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (06/09/2022).

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil II Sulsel ini menegaskan, keputusan pemerintah yang memilih menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi memberikan efek luar biasa bagi masyarakat.

"Kasihan masyarakat. Keputusan kenaikan harga BBM subsidi sangat memberatkan masyarakat. Pemerintah sudah hilang nuraninya, tidak merasakan betapa beratnya kehidupan hari demi hari," ungkap pria yang akrab disapa Akmal ini.

Legislator asli putra Kabupaten Bone ini mengatakan, adanya demonstrasi di sejumlah daerah ini terkait keresahan yang dirasakan masyarakat.

"Kenaikan BBM subsidi mengakibatkan semua mengalami kenaikan harga. Jali keputusan kenaikan BBM subsidi perlu ditinjau ulang dan dibatalkan." ucap AAP

Sebagai Wakil Rakyat, kata Andi Akmal Pasluddin, dirinya bertekad untuk terus menyuarakan aspirasi kepentingan masyarakat.

"Rakyat ingin agar BBM diturunkan," sebut AAP. Sekadar diketahui, Pemerintah Pusat resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), per Sabtu (3/9/2022).

BBM yang naik merupakan jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar.

Harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 ribu per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Adapun Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.





Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M Anggota Komisi IV DPR RI

"Adanya demonstrasi di sejumlah daerah ini terkait keresahan yang dirasakan masyarakat. Kenaikan BBM subsidi mengakibatkan semua mengalami kenaikan harga. Jadi keputusan kenaikan BBM subsidi perlu ditinjau ulang dan dibatalkan





## **Aleg PKS Ingatkan Pemerintah akan Sederet Dampak Mengerikan** Akibat Naiknya Harga BBM

Jakarta (07/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin menanggapi kebijakan Pemerintah yang akhirnya secara resmi mengumumkan kenaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu (04/09/2022).

Meskipun banyak ditentang dan diprotes oleh elemen rakyat, kata Hamid, Pemerintah berdalih tetap menaikkan harga BBM sebagai solusi untuk mengurangi beban subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Fraksi PKS DPR RI menyoroti kebijakan Pemerintah tersebut bahkan walk out dari rapat paripurna DPR RI. Kebijakan ini dinilai tidak mendengar dan tidak menghiraukan masukan keluhan dan aspirasi rakyat.

Kebijakan ini, tentunya akan berdampak secara luas. terutama pada masyarakat yang tidak mampu dan yang masih hidup dalam garis kemiskinan," demikian tegas Legislator asal Dapil Jateng IV ini.

Masvarakat kurang mampu, kata Hamid, akan menderita akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini, belum lagi dengan timbulnya Multiplier effect pasca kenaikan, misalnya dampak kenaikan harga-harga lainnya khususnya harga pangan.

"Oleh karena itu FPKS DPR RI akan terus mengkonsolidasikan langkah politik demi memperjuangkan harga BBM atau pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM tersebut," ujar Hamid.

Hamid juga menegaskan, akan muncul sederet implikasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi ini diantaranya, Pertama, Lonjakan Harga bahan bakar dipastikan akan

mendorong inflasi lebih laniut. "Diperkirakan inflasi

kemungkinan akan melintas di atas 7% (yoy). Selain itu ada potensi risiko bahwa inflasi inti akan berada di atas 4% pada akhir tahun ini. Faktanya sudah ada peningkatan harga beberapa waktu di tahun ini bahkan sebelum efek kenaikan harga bahan bakar. Perluasan efek kenaikan harga menjadi hal utama vang harus diperhatikan," ielas Hamid.

Kedua, Ianiut Hamid. memangkas Pertumbuhan Ekonomi. Kenaikan harga BBM, baik Solar, Pertalite dan Pertamax, berisiko dapat memangkas pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan harga ketiga jenis BBM ini tentunya dapat mengurangi daya beli masyarakat, terlebih konsumsi BBM ienis Pertalite merupakan vang terbesar dalam konsumsi bensin secara total di Indonesia. Hal ini akan berisiko mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diharapkan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022." pungkasnya.



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Kenaikan harga ketiga jenis BBM ini tentunya dapat mengurangi daya beli masyarakat, terlebih konsumsi BBM jenis Pertalite merupakan yang terbesar dalam konsumsi bensin secara total di Indonesia. Hal ini akan berisiko mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diharapkan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022



Inflasi berpotensi melonjak tajam

## PKS: Hentikan rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah saat ini sedang membahas mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk BBM jenis Pertalite dan Solar Subsidi.

Kenaikan harga BBM akan berdampak pada inflasi.

#### Dampak:

Harga kebutuhan pokok dan harga komoditas lain naik, daya beli masyarakat turun.



Saya menolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM saat ini akan berdampak pada bertambahnya orang miskin dan memburuknya situasi ekonomi akibat inflasi yang tidak terkendali

> Dr. Hermanto, S.E., M.M Anggota Komisi IV DPR RI FPKS

Inflasi kuartal II 2022 **4,94%** 

Tertinggi sejak Oktober 2015

- Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan porsi 51,47 persen. Jika inflasi meningkat tajam, disertai dengan pelemahan faktor pertumbuhan ekonomi nasional, maka berpotensi menimbulkan stagflasi.
- Inflasi bahan makanan 10.32%

(yoy, Juli 2022)









## Imbas Kenaikan Harga **BBM, Wakil Ketua FPKS: PHK di Depan Mata**



"Sekarang banyak pelaku UMKM yang menghadapi dilema. Mau menaikkan harga, nanti pembeli lari. Mau tetap di harga yang sama, tidak menutup pengeluaran. Bukan tidak mungkin iika nanti banyak UMKM yang gulung tikar," papar Netty.

Jakarta (07/09) -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani khawatir imbas kenaikan harga BBM berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran di sektor industri

"BBM adalah kebutuhan dasar dunia industri. Jika harganya naik maka beban operasional perusahaan juga naik. Otomatis produk yang dihasilkan harganya bertambah mahal. Padahal daya beli masyarakat sedang melemah akibat imbas kenaikan BBM," kata Netty dalam keterangan media, Selasa (06/09/2022).

"Jika biava operasional tinggi, sementara serapan pasar rendah, maka jalan pintasnya ialah PHK untuk mengurangi

beban perusahaan" ungkap Netty.

Menurut Netty, dampak kenaikan BBM ini tidak hanya menyasar perusahaanperusahaan besar, tapi juga para pelaku UMKM.

"Sekarang banyak pelaku UMKM yang menghadapi dilema. Mau menaikkan harga, nanti pembeli lari. Mau tetap di harga yang sama, tidak menutup pengeluaran, Bukan tidak mungkin jika nanti banyak UMKM yang gulung tikar," papar Netty.

Selain soal PHK, Netty juga menyoroti aspek kesejahteraan pekeria saat menghadapi kenaikan harga BBM.

"Ketika barang-barang di pasaran naik, tapi tidak diikuti dengan naiknya upah, maka yang terganggu adalah keseiahteraan keluarga di Indonesia, Biava rumah tangga termasuk untuk belania asupan keluarga mesti terganggu. Apalagi penghitungan UMK untuk 2023 nanti akan menggunakan formula dalam PP Nomor 36 Tahun 2022, di mana tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan upah buruh," kata Netty.

Oleh karena itu. Netty meminta pemerintah memikirkan skema penanganan imbas kenaikan BBM dengan sungguh-sungguh, jangan hanya meminta rakyat bersabar dan tidak mengeluh.

Sementara itu dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Selasa (06/09/2022), Fraksi PKS melakukan aksi walkout untuk menolak kenaikan harga BBM.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

"BBM adalah kebutuhan dasar dunia industri. Jika harganya naik maka beban operasional perusahaan juga naik. Otomatis produk yang dihasilkan harganya bertambah mahal. Padahal daya beli masvarakat sedang melemah akibat imbas kenaikan BBM"







#### **BBM Subsidi Naik, Aleg PKS: Bukti Pemerintah Tidak Pro Wong Cilik**

Jakarta (06/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Riau 1, Chairul Anwar, sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi

Hal itu, kata Chairul, akan menambah beban hidup rakvat terutama masyarakat golongan bawah yang paling merasakan dampak kenaikan BBM.

"Langkah Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang sangat disayangkan yang akan berdampak besar terutama kepada wong cilik, para petani, nelayan, buruh, pedagang, pengemudi ojek, ibuibu, semuanya pasti terdampak paling besar terhadap kenaikan BBM ini," ungkap Chairul di Gedung Parlemen, Selasa, (06/09).

Chairul menambahkan dampak kenaikan BBM akan menambah penderitaan rakvat kecil dan akan menambah jumlah orang miskin serta daya

beli masvarakat pasti akan menurun dengan tingginya nilai inflasi.

"Daya beli masyarkat kecil akan menurun, harga-harga akan naik, pendapatan buruh vang selama ini hampir tidak naik akan menyebabkan bertambahnya masyarkat miskin. Perkiraan inflasi akan mencapai lebih dari 7 % bahkan lebih. Apakah ini tidak difikirkan oleh pemerintah yang selama ini mengusung jargon pro wong cilik? Jangan-jangan slogan itu hanya sekedar slogan tanpa diikuti dengan kebijakan yang pro wong cilik,"tegas Politisi asal Riau.

Selain itu Chairul iuga mengungkapkan, program Bansos dan Bantuan Langsung Tunai tidak akan mengurangi

penderitaan rakvat, bahkan hal tersebut menurut beberapa pakar ekonomi akan menambah jumlah rakyat miskin menjadi sekitar 10,5% dan jangka waktu BLT hanya beberapa bulan sedangkan kenaikan harga kebutuhan akan selamanya terjadi belum lagi jika dilihat jumlah rakyat vang mendapatkan Bansos tidak sebanding dengan jumlah rakvat vang terdampak kenaikan BBM bersubsidi.

"Program Bansos dan BLT tidak akan mampu mengurangi penderitaan rakvat, harga-harga naik tidak sebanding dengan BLT vang diberikan pemerintah. apalagi BLT hanya bersifat sementara, Ibarat obat BLT ini cuma penghilang sakit sementara, tapi penyakitnya tidak diobati. Dari segi jumlah rakvat vang diberikan bansos juga sangat kecil dibandingkan dengan rakyat terdampak kebijakan tersebut. Kami di Fraksi PKS DPR RI dengan tegas mendesak kepada pemerintah agar mencabut kebijakan menaikkan BBM bersubsidi, jangan karena kepentingan rakyat kecil meraka tidak diperhatikan. disisi lain untuk biava Kereta cepat Jakarta-Bandung, Provek IKN, Penambahan Modal BUMN dan lainnya pemerintah malah mengeluarkan biaya yang besar untuk program yang tidak ada hubungannya dengan wong cilik," tutup Chairul,



Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

"Langkah Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang sangat disayangkan yang akan berdampak besar terutama kepada wong cilik, para petani, nelayan, buruh, pedagang, pengemudi ojek, ibu-ibu, semuanya pasti terdampak paling besar terhadap kenaikan **BBM** ini





Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

## **Anggota FPKS: Pemerintah Jangan Adu Domba Rakyat Mampu dan Tidak**



Jakarta (08/09) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis memberikan kritik pada pemerintah yang jelas menolak harga kenaikan BBM ini.

"Saya sangat jelas dan tegas dalam menanggapi kenaikan harga BBM bersubsidi yang mana pemerintah telah menetapkan harga bbm tersebut di angka 10.000 rupiah per liter nya. Saya jelas sangat tidak setuju apabila harga ini terus di tetapkan pemerintah dalam jangka waktu vang lama, terlebih kondisi sekarang disaat masyarakat susah kesulitan, semua nya baru pulih dari Pandemi Covid-19 yang belum stabil di semua sektor. Ini ielas sangat membebani masyarakat khusus nya yang menengah kebawah. Saya harapkan pemerintah perlu mengkaji ulang kembali kebijakan kenaikan harga BBM ini". Uiar Iskan.

Anggota Legislative asal Sibuhuan ini juga mengingatkan kepada pemerintah yang

mengklaim anggaran subsidi tersebut.

"Kita juga perlu mengkritisi pemerintah terkait subsidi 502 triliun rupiah yang naik dari angka 152,5 triliun rupiah. Ini jangan-jangan merupakan satu hal untuk menguntungkan para mafia-mafia dan rakvat tidak mengetahui itu. Ini yang meniadi pertanyaan besar kita Anggota Dewan Fraksi PKS kemana saja uang anggaran sejumlah 502 triliun itu. Semoga pemerintah bisa merespon perjuangan kita agar dapat di kaji kembali kebijakan kenaikan harga bbm tersebut dan dapat mempertimbangkan khusus nya untuk masyarakat kita yang kurang mampu atau vang perekonomian nya sedang sulit dalam cluster menengah kebawah", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga

menambahkan jangan sampai Pemerintah mengadu domba antara orang vang kurang mampu dan yang mampu.

"Saya ingatkan kepada Pemerintah untuk jangan sampai melakukan suatu hal yang berbentuk mengadu domba antara orang miskin dengan orang kaya. Kalau dianggap BBM ini tidak tepat sasaran, jadi orang-orang kaya itu kan pasti dia memakai BBM non subsidi, iustru kebanyakan BBM itu adalah untuk pengangkutan-pengangkutan. Hal ini adalah untuk supaya harga bahan pokok tidak naik, untuk membawa savur-savur di daerah. Jadi jangan sampai pemerintah membandingkan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal BBM bersubsidi ini. Saya ingatkan bahwa secepat mungkin pemerintah harus menyesuaikan harga BBM ini sehingga tidak ada yang terbebani lagi khususnya masyarakat kita yang tidak mampu", pungkas Iskan mengakhiri.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. Danil Sumatera Utara II

"Saya jelas sangat tidak setuju apabila harga ini terus di tetapkan pemerintah dalam jangka waktu yang lama, terlebih kondisi sekarang disaat masyarakat susah kesulitan, semua nya baru pulih dari Pandemi Covid-19 yang belum stabil di semua sektor."







Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA Ketua Fraksi PKS DPR RI Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T





# Wakil Ketua FPKS: Data Kominfo Bocor Lagi, Bisa Hilang Kepercayaan pada Kominfo



Jakarta (02/09) --- Data yang dikelola Kementrian Komunikasi Dan Informasi (KOMINFO) kembali bocor dan dijual secara bebas.

Sejumlah 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar diduga bocor dan dijual di forum online breached.to.

Menurut penjual data dengan username Bjorka, data bocor tersebut berasal dari server milik Kementerian Kominfo.

Menanggapi hal ini anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan bahwa kepercayaan rakyat dan perusahaan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI bisa hilang.

"Kalau membaca komentar masyarakat di dunia digital, rakyat seperti kehilangan kepercayaan terhadap Kominfo. Perusahaan bisa jadi tidak lagi percaya kepada Kominfo. Belum jelas penyelesaian kasus kebocoran 17 juta data PLN dan 26 juta data Indihome kini lebih besar lagi 1,3 milliar data di

duga bocor," ungkap Sukamta.

Sumber kebocoran data ini belum jelas, Kominfo dan operator seluler sama-sama mengklaim tidak ada kebocoran data. Tanggungjawab tentu ada pada pengelola data. Apabila dikaitkan dengan perdebatan dan keinginan Pemerintah bahwa pengawas pelindungan data berada di bawah Kominfo tentu akan menjadi masalah.

"Kalau benar terjadi kebocoran data sebesar itu, ini menjadi gempa data nasional. Sejak awal kami sdh wanti wanti kepada kominfo soal pendaftaran Simcard ini. Perlu tetapi taruhannya adalah keamanan data pemilik kartu," tegasnya.

Sukamta meminta Kominfo untuk segera memberikan penjelasan secepatnya soal ini dan kalau benar terjadi, perlu segera melakukan mitigasi resiko dan memberikan pertanggungjawaban publik.

"Kalau betul bocor, ini juga perlu menjadi perhatian Presiden agar Lembaga Pengawas Pengelola Data Pribadi sebaiknya menjadi Lembaga independen" yang kuat tidak di bawah Kementrian tertentu karena Kementrian juga mengelola data pribadi," urainya.

Wakil Ketua Fraksi PKS juga mengingatkan Kominfo untuk mengevaluasi sistem perlindungan data yang dikelola.

"Kominfo harus memperbaiki sistem perlindungan datanya. Apalagi Kominfo terus mendorong perusahaan yang mengumpulkan, mengelola dan memproses data untuk melindungi data masyarakat," ujar Sukamta.

Kasus kebocoran data berukuran 87GB terbaru ini berisikan NIK, nomor ponsel, operator seluler yang dipakai, dan tanggal registrasi. Pengumpulan data ini dilakukan oleh pemerintah yang menerapkan peraturan dimana pengguna ponsel harus mendaftarkan nomor HP mereka dilengkapi dengan KTP dan KK.



H. SUKAMTA, Ph.D

"Kalau membaca komentar masyarakat di dunia digital, rakyat seperti kehilangan kepercayaan terhadap Kominfo. Perusahaan bisa jadi tidak lagi percaya kepada Kominfo. Belum jelas penyelesaian kasus kebocoran 17 juta data PLN dan 26 juta data Indihome kini lebih besar lagi 1,3 milliar data di duga bocor," fraksi.pks.id | Ahad 4 September 2022





#### Komisi III DPR RI FPKS **Dukung Polri Tindak Tegas Aparat yang Terlibat Judi Online**

Jakarta (03/09) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al habsyi mendukung langkah Polri yang serius dalam memberantas perjudian online sebagaimana diutarakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Raker dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu.

Terlebih, kata pria yang akrab disapa Habib Aboe, komitmen itu dibuktikan dengan menindak anggota polri yang terbukti terlibat dalam judi online.

"Sebagaimana diketahui belum lama ini. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Penjaringan AKP M Fajar. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahardiantono mengatakan, pemeriksaan dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penindakan judi online," terang Habib Aboe. Aboe mendorong agar

pemberantasan perjudian tidak hanva sekedar 'pemberantasan musiman' yang hanya dilakukan ketika banyak masyarakat dan 'stakeholder' menaruh perhatian terhadap hal itu.

"Saya kira apa yang dilakukan Polri cukup bagus, hanva saia hal ini harus terus dilakukan sepanjang waktu dan sampai tuntas. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa pemberantasan yang dilakukan POLRI ini baru berialan karena ada desakan publik saja. Tampak musiman" ujar Aboe.

Polri, kata Habib Aboe, harus solid, serius dan bahumembahu mengembalikan public trust yang terlanjur luluh lantak akibat sejumlah kasus terakhir yang menimpa institusi

"Tentu saja ini ujian berat sekaligus pertaruhan bagi POLRI. Masyarakat harus dikembalikan kepercayaannya terhadap POLRI dengan cara POLRI serius memberantas judi ini sampai ke akar-akarnya. Sampai ke beking-bekingnya." ujar Anggota Dapil Kalsel ini.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini juga menyarankan agar instrumen hukum dalam rangka pemberantasan periudian baik online maupun offline diperkuat dalam RKUHP vang akan datang.

"Saat ini RKUHP sedang menyerap masukan-masukan masvarakat, sava kira iika pengaturan mengenai perjudian ini diperkuat disana dapat mengoptimalkan kerja-kerja kepolisian. Karena sekarang kan sudah menjadi isu yang sangat besar, walaupun memang tid



#### HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

"Saat ini RKUHP sedang menyerap masukan-masukan masyarakat, saya kira jika pengaturan mengenai perjudian ini diperkuat disana dapat mengoptimalkan kerja-kerja kepolisian. Karena sekarang kan sudah menjadi isu yang sangat besar, walaupun memang tidak masuk kedalam 14 isu krusial. Saya kira Pemerintah dan DPR mungkin bisa meninjau ulang rumusannya, misalnya saja menghapus frasa 'tanpa izin',"

fraksi.pks.id | Senin 12 September 2022





#### **Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Rilis Ulang NTP** Petani Pasca kenaikan BBM



Jakarta (12/09) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah mempublikasi ulang NTP petani sebagai respon revisi publikasi NTP Petani vang telah di rilis 1 september 2022.

Pasalnya, pasca kenaikan BBM. telah membuat masyarakat pejuang pangan mengalami keterpurukan baik di sektor pertanian maupun perikanan tangkap.

Akmal mengungkap. bahwa Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di tahun 2022 ini selalu mengalami keadaan perekonomian yang tidak sehat seiak Maret 2022. Hal ini ditunjukkan dengan indeks NTPP (nilai tukar petani tanaman pangan) selalu dibawah angka 100 hingga bulan Agustus 2022.

"BPS telah merilis NTP nasional Agustus 2022 sebesar 106.31 pada 1 september lalu. Meski pada saat itu terjadi kenaikan 1,97 persen dibanding NTP sebelumnya, akan

dipastikan terjadi perubahan drastis dengan kenaikan BBM bersubsidi dan juga kenaikan harga pertamax", tutur Akmal.

Untuk itu, politisi PKS ini meminta, perlu dirilis ulang NTP Nasional, untuk mengoreksi apa vang telah dipublikasi BPS. Agar pemerintah dapat memahami, lanjut Akmal, bahwa dampak kenaikan BBM ini telah memukul dengan keras masyarakat kalangan bawah vang di dominasi pada sektor pertanian dan perikanan.

Pria kelahiran Kabupaten Bone ini menambahkan, bahwa kenaikan BBM ini bukan sekedar persoalan bahan bakar semata, Dampak berantai yang berawal dari logistik semua komoditas yang mesti tersebar menjangkau konsumen

masyarakat juga akan terpengaruh secara spontan. Kondisi ini yang berpotensi pada peningkatan kemiskinan akibat dava beli masvarakat yang turun drastis.

"Saya sendiri telah memantau banyak sekali informasi beredar termasuk di sosial media, tentang perang opini penvikapan pasca kenaikan BBM. Saya khawatir, masyarakat disuguhkan banyak sekali edukasi yang menyesatkan, akibat pola pikir vang dipengaruhi informasi yang salah Informasi resmi pemerintah terkait edukasi pada masyarakat mesti dilakukan dengan baik, agar di masa depan, masyarakat Indonesia ini semakin terdidik dan berwawasan, Sehingga Pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan negara ini penuh integritas, tidak perlu ada kepalsuan yang direkayasa. termasuk kondisi masvarakat pasca kenaikan BBM ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.



"Saya sendiri telah memantau banyak sekali informasi beredar termasuk di sosial media, tentang perang opini penyikapan pasca kenaikan BBM. Saya khawatir, masyarakat disuguhkan banyak sekali edukasi yang menyesatkan, akibat pola pikir yang dipengaruhi informasi yang salah. Informasi resmi pemerintah terkait edukasi pada masyarakat mesti dilakukan dengan baik, agar di masa depan, masyarakat Indonesia ini

semakin terdidik dan berwawasan.

#### FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





Bebani Petani dan Nelayan

## Politisi PKS Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM



Jakarta (07/09) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto mendesak Presiden Joko Widodo agar membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena jelas akan berdampak langsung pada peningkatan pengeluaran petani, nelayan dan pengemudi angkutan umum.

"Sekarang ini petani sudah melakukan mekanisasi, mulai dari tanam sampai paska panen. Mekanisasi ini pakai BBM. Kalau BBM naik maka sudah pasti pengeluaran petani juga akan naik," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Sementara itu, lanjutnya, hasil panennya belum tentu bertambah.

"Kalaupun hasil panennya melimpah, biasanya harga jatuh," ujar legislator dari FPKS DPR RI ini. "Jadi, pengeluaran petani sudah pasti bertambah. Sementara pendapatan, belum tentu bertambah. Hal ini jelas memberatkan kehidupan para petani." tambah Hermanto.

Demikian juga dengan nelayan. Mereka melaut pakai mesin. Mesin pakai BBM.

"Harga BBM naik maka pasti pengeluaran nelayan juga bertambah. Sementara penghasilan belum tentu bertambah," papar Hermanto.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id



Dr. HERMANTO, S.E., M.M Anggota Komisi IV DPR RI

"Kenaikan BBM membuat pengeluaran mereka bertambah. Sementara tarif tidak bisa serta merta dinaikkan. Kalaupun tarif naik, ada kemungkinan konsumen berkurang karena beralih ke moda transportasi lain"

#### FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





#### Soal Kenaikan BBM, Aleg PKS Nilai Pemerintah Acuh dan 'Mati Rasa' atas Penderitaan Rakyat



Jakarta (04/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyesalkan keputusan Pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi per 3 September 2022 dengan kenaikan tarif yang drastis.

Menurut Johan keputusan ini sebagai bukti Pemerintah tidak mendengar jeritan rakyat kecil serta telah bersikap acuh atau cuek terhadap derita jutaan nelayan yang terancam tidak bisa melaut.

"kita menolak dan protes terhadap keputusan ini karena pemerintah telah 'mati rasa' terhadap kesusahan hidup keluarga Indonesia dan keputusan kenaikan BBM ini sangat tidak berpihak pada kepentingan petani dan pelaku UMKM serta seluruh komponen masyarakat wajib Bersatu untuk menolak keputusan ini". tegas Johan.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan akan semakin meningkat akibat pendapatan riil yang semakin berkurang.

"Coba bayangkan, semua kapal nelayan yang menggunakan mesin 100% bergantung pada BBM, sama bergantungnya para petani, Tukang ojek juga para pedagang kecil. Pemerintah mesti sadar bahwa pengeluaran untuk BBM itu pasti, tapi hasil melaut bagi nelayan dan hasil panen bagi petani itu belum tentu mereka dapatkan, maka menarik subsidi BBM otomatis meningkatkan biaya produksi petani dan nelayan kita", urai Johan.

Selanjutnya Johan menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan memukul sektor Pertanian terutama jasa Pertanian, perikanan dan hasil hutan.

"Bagi sava keputusan Pemerintah soal BBM ini sebagai keputusan yang zhalim karena kenaikan harga BBM pasti berdampak pada menurunnya produksi industry di seluruh sektor, pasti teriadi penurunan penyerapan tenaga kerja dan turunnya tingkat upah, maka segala upaya perencanaan program dengan anggaran besar untuk meningkatkan lapangan keria menjadi hangus dan sia-sia akibat keputusan zalim ini", tandas Johan.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini juga berpandangan bahwa kenaikan BBM akan berdampak turunnya pendapatan riil setiap rumah tangga di Indonesia serta akan terjadi penurunan konsumsi masyarakat secara keseluruhan.

"Kenaikan BBM ini berdampak luas dan sistemik karena berpengaruh signifikan pada kondisi dapur setiap rumah tangga serta memiliki efek buruk jangka pendek dan jangka Panjang karena



H. JOHAN ROSIHAN, S.T

"Saya sesalkan cara pandang pemerintah menaikkan harga BBM dengan kompensasi bansos, yang hal ini pasti tidak akan memperbaiki daya beli rumah tangga yang terus turun karena pendapatan yang jauh lebih kecil dibanding tingkat inflasi yang terus meroket"

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, Kesehatan, politik, penurunan gizi masyarakat, berpotensi peningkatan stunting dan prevalensi anemia serta memperburuk ketahanan pangan nasional" ucap Johan. Selengkapnya kunjunggi fraksi.pks.id





#### Parlementaria ( Diskusi Publik, PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report, Ruang Aleg dan Internshipks)













Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.





#### Aleg PKS: Operasional Truk Berdimensi Besar Harusnya Jangan Diwaktu Ramai



Jakarta (02/09) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama merespon peristiwa kecelakaan truk yang merenggut korban jiwa di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (31/08/2022).

Belum hilang dari ingatan, kata Suryadi, terjadinya kecelakaan truk pertamina di Cibubur, kecelakaan maut truk pengangkut barang kembali terjadi.

"FPKS turut berduka dan prihatin atas kejadian ini, sebab sudah terlalu banyak kecelakaan yang diakibatkan oleh truk angkutan barang," ungkap pria yang akrab disapa SJP.

Hal ini, kata SJP, adalah salah satu dampak negatif operasional truk di jalan-jalan arteri.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 Kasus pada tahun 2021, jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yaitu sebanyak 100.028 kasus.

Dimana kecelakaan yang diakibatkan oleh truk angkutan barang menempati urutan kedua dengan prosentase sebesar 12%, sedangkan urutan pertama didominasi oleh kecelakaan sepeda motor dengan prosentase sebesar 73%.

"FPKS berharap
Pemerintah memberi perhatian
khusus pada keselamatan lalu
lintas sebab secara umum
kecelakaan lalu lintas pada
tahun 2021 telah menewaskan
25.266 korban jiwa, dengan
jumlah korban luka berat
sebanyak 10.553 orang, dan
korban luka ringan 117.913
orang," terang Anggota DPR RI
dari Dapil NTB 1 ini.

Terkait kecelakaan yang

terjadi kemarin, kata SJP, FPKS meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas terjadinya kecelakaan ini, dan meminta agar Pemerintah cepat memberikan solusi terhadap masalah ini agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah adanya pembatasan waktu operasional, khususnya untuk truk berdimensi besar seperti truk tronton. Dimana pada jam-jam tertentu saat terjadi keramaian anak sekolah, kantor dan pasar, truk-truk besar tersebut diatur waktu perjalanannya dan menggunakannya sebagai waktu istirahat." urajnya.

Namun, lanjut SJP, apabila ingin melanjutkan perjalanan maka supir dapat melanjutkan perjalanan menggunakan jalan tol. Waktu istirahat pada jam keramaian tersebut akan membantu kondisi supir bisa lebih maksimal pada saat berkendara kembali.

"Selain itu dengan tidak beroperasinya truk pada jam keramaian tersebut, tentunya dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas," pungkasnya.

Selain itu, lanjut SJP, FPKS berpandangan Pemerintah



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

"Beberapa solusi yang bisa diterapkan adalah adanya pembatasan waktu operasional, khususnya untuk truk berdimensi besar seperti truk tronton. Dimana pada jam-jam tertentu saat terjadi keramaian anak sekolah, kantor dan pasar, truk-truk besar tersebut diatur waktu perjalanannya dan menggunakannya sebagai waktu istirahat."

perlu membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan agar selalu mengedukasi supir-supir armadanya dan juga merawat armadanya dengan baik sesuai dengan standard yang berlaku.

"Kemudian Pemerintah juga perlu memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Lalu dalam rangka menegakkan aturan-aturan tersebut perlu adanya inspeksi kendaraan secara rutin di setiap wilayah," terang Suryadi.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id

fraksi.pks.id | Senin 5 September 2022





#### Kenaikan Tarif Angkutan, PKS Minta Pemerintah Pertimbangkan Kemampuan Masyarakat

KUTIPAN

Jakarta (05/09) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo meminta Kementerian Perhubungan (Kemen hub) mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menetapkan kenaikan tarif angkutan umum.

Sigit juga meminta pemerintah meningkatkan subsidi angkutan umum sebagai bentuk pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Sigit menyusul rencana kenaikan tarif angkutan umum oleh pelaku usaha hingga 25% setelah keputusan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kenaikan tarif angkutan umum khususnya angkutan darat tidak bisa dihindari karena kenaikan harga BBM. Dan ini juga akan mendongkrak kenaikan harga barang. Karena itu, sejak awal PKS menolak kenaikan harga BBM. Tapi, karena sudah dinaikan, maka pemerintah harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan

kemampuan masyarakat sebelum menyetujui berapa besaran kenaikan tarif angkutan umum," kata Sigit.

Kenaikan tarif angkutan umum tak hanya akan berdampak pada tarif angkutan penumpang, tapi juga angkutan barang. Hal ini akan mendongkrak harga barang dan menurunkan daya beli masyarakat.

Karena itu, Sigit meminta pemerintah untuk menambah subsidi untuk angkutan umum dan angkutan barang sebagai bentuk pelayanan publik.

"Untuk angkutan umum pemerintah wajib menambah alokasi subsidi sebagai bentuk pelayanan publik. Begitu juga untuk angkutan barang untuk menjaga stabilitas harga barang agar tidak terlalu melonjak dan semakin membebani masyarakat," Kata Sigit.

Disisi lain, Sigit juga meminta Kemenhub selaku regulator untuk mengawasi kenaikan tarif angkutan umum kelas non ekonomi. Meski tarifnya tidak diatur oleh pemerintah, Sigit minta Kemenhub berkoordinasi dengan Organda agar kenaikannya tidak terlalu tinggi dan memperhayikan kemampuan masyarakat.

"Untuk kelas non-ekonomi, pemerintah memang tidak mengatur tarifnya. Tapi, sebagai regulator pemerintah punya kewenangan untukengawasi agar kenaikannya masih dalam batas kewajaran jangan sampai membebani." Kata Sigit.

Seperti diketahui, pelaku usaha angkutan darat bakal menaikkan tarif jasa, menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Setidaknya kenaikan harga diprediksi bisa mencapai 25%.



Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

"Kenaikan tarif angkutan umum khususnya angkutan darat tidak bisa dihindari karena kenaikan harga BBM. Dan ini juga akan mendongkrak kenaikan harga barang. Karena itu, sejak awal PKS menolak kenaikan harga BBM. Tapi, karena sudah dinaikan, maka pemerintah harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menyetujui berapa besaran kenaikan tarif angkutan umum."

#### FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





#### Tolak Kenaikan Harga BBM, **Aleg PKS: Angka Garis** Kemiskinan Akan **Bertambah**



Tasikmalaya (06/09) --- Anggota DPR RI Toriq Hidayat meyakini bahwa kenaikan harga BBM sejak Sabtu 3 September kemarin akan berdampak signifikan pada sektor transportasi. Karena baik angkutan penumpang maupun barang tak bisa mengelak menaikkan tarif setelah harga BBM naik.

"Sektor transportasi akan meniadi sektor yang paling cepat terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM, yaitu naiknya tarif. Akibatnya masyarakat harus membayar lebih mahal untuk naik angkutan umum, ataupun kirim barang, Kami, sangat prihatin, padahal kondisi ekonomi rakyat belum pulih sepenuhnya," ujar Politisi asal Fraksi PKS.

Toria menuturkan. kenaikan harga BBM subsidi vang teriadi pada Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 ribu per liter dan solar subsidi dari Rp 5.150 per liter

jadi Rp 6.800 per liter akan memicu kenaikan tarif angkot. Bus dalam kota dan antar kota. ojol dan taksol, serta jasa angkutan pengiriman barang.

"Dari pantauan tim kami di lapangan, Tarif Angkot dan bus dalam kota naik Rp 2.000. Lalu Bus antar kota dan iasa angkutan barang diperkirakan akan menaikan harga dalam kisaran 25 % dari tarif sebelumnya demikian juga angkutan online. Hal ini akan menimbulkan efek domino kenaikan harga di sektor lainnya," tuturnya.

Torig memastikan bahwa kenaikan tarif sektor transportasi akan diikuti dengan reaksi berantai kenaikan sektor lainnya terutama yang langsung berhubungan dengan rakvat. Beberapa waktu yang lalu. rakvat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket, Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi memperlihatkan kebijakan pemerintah saat ini tidak berempati dengan kondisi rakvat kecil. Akan banvak masvarakat vang masuk ke angka garis kemiskinan. Itu sebabnya kami dari fraksi PKS, tegas menolak kenaikan harga BBM dalam kondisi seperti ini." tutupnya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

"Kenaikan harga BBM bersubsidi memperlihatkan kebijakan pemerintah saat ini tidak berempati dengan kondisi rakyat kecil. Akan banyak masyarakat yang masuk ke angka garis kemiskinan. Itu sebabnya kami dari fraksi PKS, tegas menolak kenaikan harga BBM dalam kondisi seperti ini."





#### Aleg PKS Sudah Ingatkan BBM Jangan Dinaikan, Tapi Pemerintah Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas



Syahrul Aidi juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah yang tidak mengevaluasi program yang tidak strategis dan mendesak saat ini. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan lainnya.

Jakarta (05/09) — Kejutan pemerintah dengan menaikkan tarif BBM pada Sabtu (3/9/2022) disesalkan banyak pihak. Kenaikan itu dinilai makin menekan ekonomi masyarakat kecil.

Penolakan kenaikan BBM juga disampaikan oleh PKS beberapa waktu lalu. PKS meminta Pemerintah cari opsi lain untuk mempertahankan neraca keuangan saat ini.

Seperti yang disampaikan oleh anggota DPR RI Fraksi PKS Dr Syahrul Aidi Maazat saat dihubungi pada Ahad (4/9/2022). Syahrul menyebut kenaikan ini sangat menekan kondisi ekonomi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

"Kita menyayangkan tindakan pemerintah yang

secara tiba-tiba menaikkan harga BBM. Saat ini kondisi ekonomi tidak stabil, sekecil apapun kebijakan mempengaruhi ekonomi masyarakat." kata Syahrul Aidi.

Dia menyebut bahwa PKS dari awal menolak kenaikan BBM. Apapun alasannya. Namun pemerintah ditudingnya tetap nekat naikkan BBM.

Bahkan terkesan pemerintah itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dimana BBM Bersubsidi seperti pertalite dan solar dinaikkan, namun Pertamax dan Pertamax Turbo malah diturunkan.

"Pemerintah pekak badak, tak mau mendengar masukan. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Kenaikan harga BBM ini bakal meningkatkan angka kemiskinan, harga barang makin mahal, tingkat perjalanan menurun tajam." tegasnya.

Syahrul Aidi juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah yang tidak mengevaluasi program yang tidak strategis dan mendesak saat ini. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan lainnya.

"Harusnya pemerintah menghentikan program yang tidak substansi atau penting saat ini. Kita fokus mempertahankan ekonomi agar tidak krisis. Kenaikan BBM ini mempengaruhi semuanya." tegas Syahrul Aidi.





Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

"Kita menyayangkan tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba menaikkan harga BBM. Saat ini kondisi ekonomi tidak stabil, sekecil apapun kebijakan mempengaruhi ekonomi masyarakat"





#### Anggota FPKS: Puluhan Juta Rakyat Rentan Miskin Tak Tersentuh Bansos



Jakarta (02/09) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak kembali meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar ditengah situasi ekonomi rakyat saat ini yang masih berat.

Menurut Amin, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menimbulkan dampak pengganda (multiplier effect) antara lain naiknya biaya transportasi, harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, dan banyak lainnya.

Berdasarkan sejumlah kajian, jika harga pertalite dikerek naik menjadi Rp 10 ribu per liter, maka akan berdampak naiknya inflasi sebesar 7%. Angka tersebut sudah menghitung dampak langsung maupun tidak langsung (multiplier effect).

Dampak langsungnya sendiri akan menambah angka inflasi 0,93 poin persentase atau 0,4 point presentasi untuk setiap kenaikan Rp 1.000 per liter.

Tanpa kenaikan harga

Pertalite dan solar aja, inflasi itu trennya naik dan mulai mendekati 5%. Jika harga BBM naik, maka inflasi akan lebih tinggi lagi.

"Kondisi tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat menengah ke bawah, dan pada akhirnya konsumsi yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi akan melambat." kata Amin.

Hasil studi Bank Dunia menyebutkan, terdapat 45% penduduk Indonesia yang kondisinya rentan miskin. Dengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 275 juta jiwa, maka jumlah penduduk rentan miskin mencapai sekitar 124 juta orang. Di sisi lain, pemerintah menyediakan bantuan sosial untuk 16 juta pekerja dengan gaji per bulan Rp 3,5 juta ke bawah.

Amin melanjutkan, pemerintah memang menaikan jumlah anggaran bantuan sosial, namun itu hanya cukup untuk menolong sebagian kelompok rentan miskin. Dari 124 juta orang yang rentan miskin, hanya 16 juta pekerja vang menerima bansos.

"Jika diasumsikan seorang pekerja menghidupi tiga anggota keluarga, artinya ada 64 juta yang tersentuh Bansos, sisanya 60 juta rakyat rentan miskin berpotensi jatuh miskin akibat kenaikan harga kebutuhan pokok maupun biaya hidup lainnya," beber Amin.

Pada saat yang sama, lanjut Amin, untuk kategori rumah tangga miskin (RTM), pemerintah juga masih menggunakan data yang disusun sebelum pandemi Covid-19. Yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disusun Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Data tersebut perlu diperbarui. Pasca pandemi COVID-19, penduduk yang masuk dalam kelompok



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

"Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menimbulkan dampak pengganda (multiplier effect) antara lain naiknya biaya transportasi, harga barang kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, dan banyak lainnya.

termiskin semakin banyak, sehingga banyak rakyat yang berhak menerima berpotensi tidak terdata," ujar Amin.

Amin juga mengkhawatirkan nasib pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bisa terancam keberlanjutan usahanya. Kenaikan harga bahan baku sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga pertalite dan solar sangat memberatkan UMKM.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id

fraksi.pks.id | Sabtu 10 September 2022





#### Konferensi Kewirausahaan dan Kepemimpinan di Sumbar, Nevi Bicara Peranan Perguruan Tinggi



Padang (09/09) --- Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II dari Fraksi PKS. Nevi Zuairina pada Konferensi Internasional vang digelar Universitas Andalas, Padang,

bekerjasama dengan berbagai lembaga termasuk Kementerian BUMN bicara tentang betapa pentingnya perguruan tinggi berperan mewujudkan pertumbuhan wirausaha nasional.

Legislator PKS ini mengatakan, Universitas merupakan stok SDM vang sangat mumpuni dan berkualitas dalam mempersiapkan diri untuk terjun di berbagai sektor mulai dari ilmu pengetahuan hingga kewirausahaan.

"Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, mahalnya harga pangan dan kesehatan. Cara untuk mengatasi masalahmasalah tersebut salah satunya

diperlukan peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia vang diampu oleh SDM berkualitas lulusan perguruan tinggi", urai Nevi.

Politisi perempuan Sumbar yang duduk di Komisi VI ini menjelaskan, lapangan kerja baru vang diwujudkan oleh lulusan perguruan tinggi. diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bila kondisi ini dapat diwujudkan, akan membantu perputaran perekonomian di Indonesia.

Nevi menambahkan, Untuk mendorong perwujudan kewirausahaan, pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan seperti program pelatihan, dukungan akses pembiayaan yang murah hingga pendampingan untuk UMKM

"Pembiayaan selama ini meniadi tantangan yang kerap ditemui pelaku UMKM. Oleh sebab itu pemerintah menyediakan akses dana murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga relatif kecil vakni 3%. Sementara untuk koperasi tersedia pendanaan khusus dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Lavanan Umum di bawah koordinasi Kemenkop UKM", jabar Nevi.

Nevi yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menerangkan, target penambahan wirausaha baru hingga 1.5 juta tidaklah mudah. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak termasuk dengan perguruan tinggi. Sehingga, menurutnya, Semua pihak perlu mendorong peningkatan wirausaha di Indonesia sehingga di tahun 2022, rasio kewirausahaan dapat meningkat meniadi 3 75%

Selengkapnya kunjunggi fraksi.pks.id



Hj. NEVI ZUAIRINA

"Masalah yang umumnya dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan, mahalnya harga pangan dan kesehatan. Cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut salah satunya diperlukan peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia yang diampu oleh SDM berkualitas lulusan perguruan tinggi".





## Politisi PKS Asal Aceh Minta Jokowi 'Cabut Kebijakan' Naikan Harga BBM!

KUTIPAN

Jakarta (03/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh, Rafli menanggapi serius keputusan Pemerintah menaikan harga BBM.

Rafli meminta kebijakan yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo Sekira Jam 14.30, pada Sabtu (03/09/2022) dicabut karena tidak pro rakvat.

"Kita dari awal tegas menolak kenaikan harga BBM, karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna. Kita harap kebijakan ini di cabut. Karena kalau tidak berarti ada yang salah dalam mengelola Negara ini khususnya terkait BBM," tegas Rafli, (03/09).

Menteri ESDM Arifin Tasrif selanjutnya menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru, Yakni ; Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter

Rafli menambahkan kenai-

kan harga BBM yang berlaku mulai siang ini, tidak tepat.

"Mengingat kondisi masyarakat baru juga bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi. Apalagi dengan iming-iming kompensasi berupa BLT sebesar 150.000 perbulan bagi masyarakat selama 4 bulan. Tentu hal ini kita tentang" ujar politisi PKS itu.

Rafli menilai keliru jika terjadi kenaikan harga ditengah minyak mentah dunia turun sekitar 30 dollar per barel. Belum lagi kalau kita bandingkan BBM di malaysia yang jauh lebih murah dibanding negara kita.

"Ingat, dampak kenaikan BBM akan membuat harga barang naik, terutama bahan pokok.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id



"Mengingat kondisi masyarakat baru juga bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi. Apalagi dengan imingiming kompensasi berupa BLT sebesar 150.000 perbulan bagi masyarakat selama 4 bulan. Tentu hal ini kita tentang"



dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami juga mendorong agar pemerintah meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap siapa saja yang sesungguhnya yang berhak mengkonsumsi bbm bersubsidi

subsidi, maka jangan akibatnya

Selengkapnya kunjunggi

## fraksi.pks.id | Rabu 7 September 2022 Raker bersama Menteri

## **ESDM, Komisi VII FPKS:** Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi!



Jakarta (08/09) --- Rapat Kerja bersama Menteri ESDM RI, Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Diah Nurwitasari menegaskan bahwa Fraksi PKS meminta pemerintah meninjau ulang dan mencabut keputusan atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Fraksi pks berpandangan bahwa tidak salah dan tidak tabu kalau pemerintah menimbang ulang mencabut keputusan atau membatalkan keputusan kenaikan harga bbm bersubsidi. Karena diharapkan dapat memberikan keringan kepada masyarakat.", tegas Politisi PKS Dapil Jawa Barat tersebut.

Dalam kegiatan Rapat Kerja bersama Menteri ESDM RI (08/09), Politisi lulusan jerman tersebut menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga bbm bersubsidi terus terjadi secara bergelombang.

"Pak menteri, Aspirasi

masyarakat ini sudah terjadi secara bergelombang. Setiap hari kita sudah melihat di seluruh Indonesia masvarakat sudah menyampaikan sikapsikapnya terkait kenaikan harga bbm bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah", ungkap Diah.

Aleg PKS dapil Jawa Barat II tersebut juga menyampaikan bahwa Fraksi PKS seialan dengan aspirasi masyarakat yang mana menyesalkan kebijakan kenaikan harga bbm bersubsidi.

"Tentu saia kami menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait kenaikan harga bbm bersubsidi. Masyarakat merasakan bukan hanya kenaikan pada bbm

semata, tapi juga pada transportasi dan komoditas lainnya", uiar Diah,

la juga menyesalkan, bahwa ada bagian dari pemerintah yang bertindak tanpa mempertimbangkan secara matang, dalam hal ini melemparkan isu terkait kenaikan harga BBM lalu.

"Sangat disayangkan Ketika pemerintah menyampaikan informasi kenaikan secara informal, dimana pemerintah membuat masyarakat menjadi cemas dan takut. Sehingga terjadi crush pengantrian besarbesaran di SPBU," tegas politisi perempuan pks tersebut.

Diah juga menyampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini secara langsung di depan Menteri ESDM RI, bahwa pemerintah harus menyampaikan informasi yang tepat kepada masvarakat, khususnya terkait angka subsidi.

"Sering disebutkan angka 502 triliun adalah terkait subsidi dan kompensasi BBM. Padahal nyatanya itu adalah kesatuan energi, dimana di dalamnya ada listrik juga LPG. Jadi angka itu harus



"Sekarang kenaikan sudah mulai terjadi di kota dan kabupaten. Kini secara merata terjadi kenaikan ongkos transportasi dan juga harga-harga di pasar. Namun di sisi lain

pendapat masyarakat masih terbatas",

diinformasikan secara benar kepada masyarakat. Karena ini bagian dari edukasi kepada masyarakat", ujar Diah.

Argumen pemerintah terkait adanya penyalahgunaan dalam penyaluran subsidi seharusnya tidak menjadi alasan untuk memberatkan masvarakat secara umum.

"Kalau alasannya selama ini adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran

fraksi.pks.id

ini." tegas Politisi lulusan

Jerman tersebut.

fraksi.pks.id | Ahad 4 September 2022





## Naiknya Harga BBM **Bersubsidi, Politisi PKS: Pemerintah Tidak Peka Kesulitan Rakyat!**



Jakarta (03/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengkritik keras kebijakan kenaikan BBM yang diambil pemerintah, di saat ekonomi sedang akan tumbuh pasca pandemi.

Jelas, kata Rofik, kebijakan ini tidak pro rakvat karena memberi beban baru buat rakvat.

"Pemerintah tidak peka dengan kesulitan rakyat. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat miskin." kata Rofik Hananto menanggapi pengumuman kenaikan BBM oleh pemerintah. Sabtu (03/09) sore.

Imbas kenaikan BBM ielas akan menaikkan biaya trasnport dan langsung akan menaikan harga-harga barang. Dan dampaknya akan langsung dirasakan rakvat. Pendapatan mereka akan menurun karena daya beli secara umum turun.

"Ada banyak petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan,

dan sektor lain vang akan sangat terpukul dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi ini. Bantuan BLT yang dijanjikan tidak sebanding bila dibandingkan dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi, ini tidak menyelesaikan masalah. tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. " kata Rofik

Menurut Rofik, Pemerintah selalu beralasan bahwa BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Seharusnya pemerintah segera memperbaiki aturan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Bukan mencari ialan pintas menaikan BBM bersubsidi," tandasnya. Rofik juga mengkritisi sikap inkonsistensi Presiden Jokowi. Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengkritik kebijakan BLT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kompensasi kenaikan BBM subsidi pada Juni 2013 yang dinilai tidak mendidik rakvat.

"Presiden Jokowi tidak konsistensi, dulu mengatakan BLT dinilai tidak Mendidik rakvat, sekarang justru menerapkannya." tegas Rofik

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax, Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.

Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter meniadi Rp 10.000 per liter. Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter meniadi Rp 14.500 per liter.



H. ROFIK HANANTO. S.E

"Ada banyak petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, dan sektor lain yang akan sangat terpukul dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi ini. Bantuan BLT yang dijanjikan tidak sebanding bila dibandingkan dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi, ini tidak menyelesaikan masalah, tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. "





#### Wakil Ketua FPKS: Harga Minyak Dunia Terus Turun, Harusnya Harga BBM Subsidi Tak Naik



Jakarta (01/09) — Melihat tren pergerakan harga minyak dunia yang terus turun, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi.

Sebab harga minyak dunia yang sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar 100 dolar Amerika per barel.

Sehingga, kata Mulyanto, harusnya APBN 2022 masih dapat menutupi kebutuhan subsidi BBM hingga akhir tahun 2022.

"Staf Khusus (Stafsus)
Menteri Keuangan Bidang
Komunikasi Strategis Yustinus
Prastowo saja menyebutkan
anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN) tahun ini
cukup untuk membiayai subsidi
BBM dan kompensasi energi
hingga Desember 2022, selama
pergerakan harga minyak
mentah dunia berada dalam
rentang yang tidak terlalu jauh

dari 100 dolar Amerika per barel. Karena saat pembahasan revisi APBN 2022 dasarnya adalah perubahan harga ICP (Indonesia crude price) dari 63 per barel menjadi 100 dolar Amerika per barel," urai Mulvanto.

Jadi, lanjutnya, selama harga minyak mentah dunia berada dalam rentang 100 dolar Amerika per barel maka tidak ada urgensi bagi Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.

Berdasarkan data oilprice.com diketahui per tanggal 30 Agustus 2022 harga minyak mentah WTI crude maupun Brent Crude dalam 3 bulan terakhir terus turun dan sudah mendekati angka 90 dolar Amerika per barel.

Kalaupun terjadi pergerakan, maka pergerakannya secara umum tetap dalam rentang100 dolar Amerika per barel.

Karenanya, menurut Mulyanto, pergerakan harga minyak mentah dunia ini masih sesuai dengan asumsi revisi APBN 2022. Jadi alasan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi memang kurang mendasar.

Untuk itu Mulyanto mendesak Pemerintah untuk lebih mengambil opsi kebijakan pembatasan dan pengawasan, agar distribusi BBM bersubsidi ini tepat sasaran, ketimbang menaikkan harga BBM bersubsidi, yang penuh risiko.

Menurut Mulyanto kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki resiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan molil mewah menikmati BBM bersubsidi.

Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil, Pemerintah



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Membangun SDM itu tidak sama dengan membangun BTS yang segera terwujud setelah dipasang, tetapi membangun SDM adalah mempersiapkan alih generasi masa depan. Di pundak mereka-mereka inilah nasib masa depan bangsa dan masyarakat Indonesia. Maka harus direncanakan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh"

terkesan membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi.

"Ini kan semakin tidak adil," tegas Pak Mul.

Sebagaimana diinformasikan media, Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan, bahwa APBN 2022 cukup sampai akhir tahun 2022 asal terpenuhi syarat dan ketentuannya.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id





#### Aleg PKS Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Kiai-Guru di Ponpes dan Madrasah Swasta

KUTIPAN

Jakarta (09/09) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta pemerintah membantu para kiai, guru, dan ustaz di pondok bdsrpesantren maupun madrasah swasta untuk memperoleh taraf hidup yang memadai.

"Kami menangkap keresahan para pengelola pendidikan hingga tenaga pendidik, khususnya di madrasah swasta, ponpes, dan lembaga pendidikan keagamaan non formal lainnya. yang mengeluhkan kurangnya kehadiran negara di tengahtengah mereka. Misalnya, masih banyak para kiai, ustaz, atau guru yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan karena honorarium vang mereka peroleh tidak cukup untuk memberikan tingkat kesejahteraan hidup yang memadai, meskipun dari mereka sendiri tidak menuntut. Namun ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah," ucap Bukhori di Jakarta, Jumat (09/09).

Desakan legislator PKS

dapil Jateng 1 ini disampaikannya setelah menerima keluh kesah para pengasuh pondok pesantren maupun guru madrasah swasta dari konstituennya di Kabupaten Kendal dalam acara bertajuk Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Kabupaten Kendal, Minggu (4/9/2022).

Selain menyoroti kurangnya perhatian pemerintah
terhadap kesejahteraan para
tenaga pendidik di ponpes dan
madrasah swasta, Anggota DPR
lulusan ponpes Tsamratul
Hidayah Jepara ini juga
menyoroti isu kepemilikan lahan
yang ditempati satuan kerja
Kementerian Agama di daerah.

"Kami menemukan sebagian madrasah negeri yang

ternyata sampai saat ini masih menempati tanah milik pemerintah daerah setempat. Dari kesaksian yang kami peroleh, hal ini yang membuat pihak madrasah mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan secara fisik. Selain madrasah, separuh dari jumlah KUA di Jawa Tengah juga berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah,' ujarnya.

Anggota Komisi Agama DPR ini mengatakan, pihaknya akan mendorong Kementerian Agama supaya bisa memperhatikan isu kepemilikan lahan ini agar diadvokasi melalui forum resmi lintas kementerian/lembaga.

"Kami akan sampaikan ini kepada Gus Menteri dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama di waktu mendatang. Kami akan mendorong Menteri Agama untuk membenahi isu kepemilikan tanah ini bersama kementerian terkait semisal Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN melalui mekanisme rapat koordinasi K/L atau rapat kabinet," pungkasnya.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kami menangkap keresahan para pengelola pendidikan hingga tenaga pendidik, khususnya di madrasah swasta, ponpes, dan lembaga pendidikan keagamaan non formal lainnya, yang mengeluhkan kurangnya kehadiran negara di tengah-tengah mereka"





### HNW Dorong Kemenag segera Realisasikan Perpres Dana Abadi Pesantren



Jakarta (08/09) --- Anggota Komisi VIII DPR-RI yang antara lain membidangi urusan agama sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, kembali mendesak realisasi dana abadi pesantren untuk pengembangan pendidikan Islam.

Hal itu disampaikannya langsung kepada Kementerian Agama, dalam forum Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama dan jajarannya, Rabu (07/09/2022).

"Hingga saat ini dana abadi pesantren belum dirasakan realisasinya oleh para Kyai, Ustadz, dan masyarakat Pesantren, padahal UU Pesantren sudah disahkan seiak tahun 2019, dan Presiden Jokowi sejak tahun 2021 sudah menandatangani Perpres Nomor 82/2021 soal Dana Abadi Pesantren, Kami sekali lagi mendesak upaya Menag dan Kemenag untuk merealisasikan dana abadi Pesantren sebagai program afirmasi, paling lambat untuk

tahun anggaran 2023," disampaikan Hidayat dalam interupsinya pada Raker Komisi VIII dengan Menag dan Kemenag Rabu (07/09/2022).

HNW sapaan akrabnya menyayangkan, hingga saat ini dana abadi Pesantren belum jelas wujudnya secara mandiri dan kongkret, karena dikhawatirkan kalaupun ada tapi itu masih tergabung dengan dana abadi pendidikan. Alhasil tidak ada transparansi alokasi berapa yang disisihkan untuk pesantren dan berapa untuk pendidikan umum.

Padahal, sejak tahun 2019 Pemerintah sudah membuat klasifikasi Dana Abadi lainnya pada Dana Abadi di Bidang Pendidikan, yakni Dana Abadi Penelitian, dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Ketiganya kini sudah memiliki akumulasi dana masing-masing sebesar Rp 8 Triliun, Rp 7 Triliun, dan Rp 3 Triliun

"Oleh karena itu sejak awal kami dari FPKS mendesak agar Dana Abadi Pesantren juga harus dipisahkan dari Dana Abadi Pendidikan. Misal dari Rp 90 Triliun Dana Abadi Pendidikan, Pesantren diberikan alokasi anggaran secara proporsional, misalnya Rp 10 Triliun, dengan imbal hasil LPDP sebagai pengelola selama ini di kisaran 5%, maka ada potensi tambahan tahunan Rp 500 Miliar hasil pengembangan yang bisa digunakan untuk pengembangan kualitas pendidikan Pesantren, santri dan keagamaan," sambungnya.

Hidayat yang merupakan Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jakarta II meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat serta Luar Negeri ini mengungkapkan, desakan terkait realisasi Dana Abadi Pesantren untuk dioptimalkan tersebut juga datang dari konstituen baik para Kyai,



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

"Selama ini 20% APBN yang digunakan untuk bidang Pendidikan, sebagian besarnya dialokasikan bagi pendidikan umum. Ketika ada alternatif baru melalui UU Pesantren yakni Dana Abadi Pesantren, ternyata keberpihakan dan realisasinya tetap lemah.

Ustadz, dan pengelola Pesantren di Jakarta, dan juga seluruh Indonesia.

Selain soal hak pesantren yang sudah mereka ketahui, juga merupakan bagian dari kekecewaan yang lebih besar terkait timpangnya keberpihakan anggaran pendidikan bagi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan termasuk untuk Pesantren.

Selengkapnya kunjunggi fraksi.pks.id

fraksi.pks.id | Senin 5 September 2022





### **Anggota FPKS Minta Malaysia Komitmen Lindungi PMI dari Kekerasan Domestik**



Jakarta (05/09) --- Kasus kekerasan yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disiksa oleh majikan di Malaysia kembali terulang. Salah satu PMI asal Sumatera Barat disiksa, hingga disebut kehilangan pendengaran saat dijenguk Dubes RI untuk Malaysia Hermono.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menegaskan pemerintah Malaysia harus menunjukkan keseriusannya dengan melindungi PMI di sektor domestik berdasarkan MoU kedua negara.

"Keseriusan ini harus ditunjukkan dengan hukuman vang berat bagi majikan PMI asal Sumbar yang menurut informasi sudah diamankan pihak berwajib. Tidak hanya dikenakan pasal biasa tapi harus dijerat dengan pasal perdagangan manusia. Hukuman berat harus diberikan agar menjadi yurisprudensi dan pelajaran agar tidak ada lagi

kejadian lainnya," ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Senin (5/9/2022).

Kurniasih menyebut kasus kekerasan domestik masih banyak terjadi di Malaysia. Kasus tunggakan gaji masih menjadi kasus yang banyak teriadi di Malavsia.

Menurut data KBRI Kuala Lumpur, sepaniang 2021 ada 206 kaasus gaji tidak dibayar ke PMI di Malaysia. Sementara hingga Februari 2022 sudah ada 16 kasus tidak dibayarnya gaji dengan nilai mencapai Rp 1.1 miliar.

"Ini baru kasus gaji belum menghitung kasus kekerasan karena perlindungan PMI di

sektor domestik sangat lemah. Mereka seolah berada di kuasa majikan, 24 jam hidup di rumah majikan dan mendapatkan ancaman jika berani melapor. Akhirnya timbul kesewenangwenangan." sebut Anggota DPR RI Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.

Kurniasih tidak ingin kasus PMI Adelina kembali terjadi. Seharusnya, papar dia, proses penegakan hukum di Malaysia membuat majikan yang melakukan kejahatan dihukum jera, bukan dengan contoh lewat pembebasan pelaku.

"Kalau proses penegakan hukum lemah di sana, sampai kapanpun masalah PMI di sektor domestik akan terus terulang. Jadi kita minta ada pembicaraan antara negara kembali dibuka untuk mencari solusi penghentian kasus kekerasan PMI di sektor domestik." sebut Kurniasih.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

"Keseriusan ini harus ditunjukkan dengan hukuman yang berat bagi majikan PMI asal Sumbar yang menurut informasi sudah diamankan pihak berwajib. Tidak hanya dikenakan pasal biasa tapi harus dijerat dengan pasal perdagangan manusia. Hukuman berat harus diberikan agar menjadi yurisprudensi dan pelajaran agar tidak ada lagi kejadian lainnya,"

fraksi.pks.id | Kamis 1 September 2022





### Tolak Kenaikan BBM, **Netty Pertanyakan Nasib Penurunan Stunting** dan Pekerja



Jakarta (02/09) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menyebut wacana kenaikan harga BBM sebagai kebijakan yang harus ditolak karena akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

"Saat harga BBM bersubsidi naik, maka harga barang kebutuhan pokok juga pasti ikut naik. Masvarakat golongan ekonomi menengah ke bawah tentu akan kesulitan menjangkau kenaikan harga tersebut," katanya dalam keterangan Jumat (02/09).

Meningkatnya harga barang-barang sebagai dampak dari kenaikan BBM, kata Netty, tentu akan menghambat upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.

"Dengan harga-harga yang sekarang saia angka stunting Indonesia masih 24,4 persen dan di atas toleransi WHO. Apalagi kalau harga barang naik,

termasuk bahan pangan bergizi yang selama ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah stunting," terang Netty.

Oleh karena itu, menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, pemerintah jangan terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Jangan sampai langkah ini justru menvulut inflasi yang akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat," ungkapnya.

Terkait rencana pemerintah memberikan bantalan kenaikan BBM berupa bantuan subsidi upah (BSU), dinilai Netty tidak efektif untuk melindungi daya beli masyarakat.

"Bantuan senilai 600 ribu untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3.5 juta per bulan tidak bisa menutupi dampak kenaikan harga BBM. Bagaimana dengan pekeria informal vang tidak teridentifikasi sehingga tidak mendapat BSU? Bagaimana nasib pekerja dengan upah 3,5 juta namun hidup di wilayah berbiaya tinggi?" tanya Netty.

Menurut Netty, bantalan sosial berupa BSU adalah cara instan pemerintah dalam menangani persoalan kenaikan harga BBM yang tidak menjadi solusi atas kenaikan inflasi. penurunan daya beli dan pada akhirnya menghambat program nasional seperti penurunan angka stunting.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah mencari skema lain vang lebih solutif dan menvelesaikan masalah dari akarnya.

"Jangan korbankan upaya membangun masa depan bangsa melalui penurunan stunting dengan memaksakan kebijakan yang tidak pro rakvat." katanva.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

"Meningkatnya harga barang-barang sebagai dampak dari kenaikan BBM, kata Netty, tentu akan menghambat upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dengan harga-harga yang sekarang saja angka stunting Indonesia masih 24,4 persen dan di atas toleransi WHO. Apalagi kalau harga barang naik, termasuk bahan pangan bergizi yang selama ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah stunting











WIDYA

**YOANDRO** 



### Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





### Wakil Ketua Komisi X FPKS: Pembahasan RUU Sisdiknas Sebaiknya Ditunda



Jakarta (01/09) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, DR. H. Abdul Fikri Faqih meminta penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) karena sederet proses inisiasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai pengusul belum dilakukan atau masih kurang.

"Misalnya terkait peta jalan pendidikan yang belum jelas, derasnya kritik publik karena minimnya keterlibatan publik, hingga dugaan liar adanya pasal-pasal yang menghapus substansi penting," urai Flkri di Jakarta, Rabu (31/08/2022).

Menurut politisi PKS ini, awalnya revisi UU Sisdiknas diusulkan oleh DPR, namun kemudian tiba-tiba pemerintah menjadi pengusulnya.

"DPR awalnya menilai UU 20/2003 tentang Sisdiknas mesti ada beberapa penyesuaizzan karena perkembangan teknologi dan seterusnya, tapi kemudian menjadi inisiatif pemerintah, sehingga kami

sifatnya menunggu draft," imbuh Fikri.

Namun, setelah ada draft pemerintah yang dikirimkan kepada Baleg DPR, Komisi X mengevaluasi beberapa hal yang sebelumnya dibahas oleh panitia kerja (panja) di Komisi X dan menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Kemendikbud.

"Misalnya rekomendasi soal peta jalan pendidikan yang dibuat oleh Kemendikbud, faktanya tidak diteruskan, padahal menjadi dasar kita untuk melangkah ke pembahasan revisi UU Sisdiknas," kata Fikri.

Menurut Fikri, bila peta

jalan yang menjadi acuan tidak ada, UU Sisdiknas yang dihasilikan nantinya tidak punya arah dan tujuan yang jelas. "Apalagi UU Sisdiknas yang baru ini rencananya menggabungkan tiga UU lainnya sehingga menjadi Omnibus (UU Paying) pendidikan, yakni UU 20/2003, UU 14/2005 tentang guru dan dosen, serta UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi," sambungnya.

Selain itu, pembuatan draft RUU Sisdiknas versi pemerintah dinilai minim partisipasi publik, selain juga belum banyak melibatkan pakar dan ahli pendidikan dalam prosesnya. "Beberapa pihak mengritik substansi RUU Sisdiknas versi pemerintah ini tidak ielas, tidak konkret, menimbulkan berbagai kebingungan dan tanda tanya, bahkan disinyalir seperti dibuat di ruang gelap vang tanpa keterlibatan pakar. cenderung tidak transparan dan terburu-buru." urai Fikri.

Maka, tidak heran lanjut Fikri, beredar banyak sekali isuisu liar karena hilangnya beberapa pasal yang memuat substansi penting dalam RUU Sisdiknas versi pemerintah.

"Sebut saja kemarin ramai



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

"Secara substansi kita harus lebih transparan dan komunikatif lagi, meski saya kira pendidikan ini memang harus banyak terima kritik, kita anggap bagian dari terapi, yang bila kita akomodasi dan itu positif, kita dapat perbaiki sesuai keinginan bersama, karena pendidikan ini amanat konstitusi, bukan visi partai, tetapi visi negara sesuai UUD."

soal hilangnya kata madrasah, kemudian sekarang soal tunjangan profesi guru yang juga menghilang." ucaonya.

Hal itu menunjukkan, tidak hanya DPR, tetapi publik secara umum dan masyarakat

pendidikan khususnya merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan UU omnibus ini, sehingga timbul rasa kecurigaan dan resistensi yang tinggi.

Selengkapnya kunjunggi fraksi.pks.id

#### FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** REPUBLIK INDONESIA





### **Aleg PKS Sampaikan Catatan Penting dalam** Revisi UU Sisdiknas



Jakarta (02/09) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, menyebut bahwa ada tiga catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah dalam melakukan perubahan/revisi terhadap UU Sisdiknas. Hal ini disampaikannya dalam acara PKS Legislative Corner Fraksi PKS DPR RI, Jumat siang (02/09).

Menurut Fahmy, catatan pertama ialah bahwa RUU Sisdiknas harus tetap mempertahankan muatan atau konten-konten baik vang ada di UU eksisting.

"UU ini harus berorientasi untuk mengharmonisasikan tiga UU yang sudah ada, yakni UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dalam prosesnya, jangan sampai norma-norma umum vang sudah baik di tiga UU itu dihilangkan", ungkapnya

Selanjutnya, menurut Fahmy, yang perlu menjadi catatan ialah agar RUU Sisdiknas tetap sesuai dengan koridor konstitusi

"Kalau ingin dilakukan perubahan, maka harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang ada di konstitusi. Bahwa ielas disebutkan kalau tujuan pendidikan nasional kita adalah untuk meningkatkan iman, tagwa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tidak boleh diubah. Kita harus pastikan jangan sampai RUU ini menyelisihi konstitusi karena hal itu akan sangat bermasalah", ujarnya lagi.

Terakhir, Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V ini meminta agar RUU Sisdiknas mencakup perbaikan di tiga sektor utama pendidikan, vakni persoalan guru, kurikulum, dan saranaprasarana.

"Ada tiga hal yang harus kita perhatikan, Pertama, guru, Hal ini terkait dengan perihal iumlah guru yang harus memadai, kecakapan dan kemampuan guru, persebaran guru yang merata, dan kesejahteraan para guru. Keempatnya harus berialan beriringan, Kedua, kurikulum, Kita harus ubah kurikulum ini secara seksama, melibatkan para pakar. Jangan grasa-grusu. Ketiga, akses pendidikan, ini menyangkut sarana dan prasarana, Harus dipastikan bahwa seluruh rakyat bisa memperoleh kemudahan akses untuk mengenyam pendidikan", pungkas Fahmy.



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Kalau ingin dilakukan perubahan, maka harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang ada di konstitusi. Bahwa jelas disebutkan kalau tujuan pendidikan nasional kita adalah untuk meningkatkan iman, tagwa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tidak boleh diubah. Kita harus pastikan jangan sampai RUU ini menyelisihi konstitusi karena hal itu akan sangat bermasalah





### Anggota FPKS Ingatkan Peran Strategis BPK dalam Mengawal APBN untuk Kesejahteraan Rakyat



Jakarta (08/09) --- Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan BPK dan BPKP pada Rabu (07/09/2022) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

RDP membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK dan BPKP dalam RUU APBN 2023. Dalam rapat ini, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa catatannya.

Pertama, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menekankan bahwa BPK perlu memiliki pandangan menyeluruh terhadap postur RAPBN 2023.

Selain itu, BPK juga perlu mencermati hal-hal yang menurut pemerintah menjadi beban APBN. Seperti diketahui, pemerintah menyampaikan bahwa dana pensiun, gaji ASN, TNI, POLRI hingga subsidi BBM, menjadi beban bagi APBN.

Oleh karenanya pemerintah melakukan perubahan postur anggaran sehingga

terjadilah kenaikan harga BBM bersubsidi yang mendapat reaksi negative luar biasa dari masvarakat. Sebagai satusatunya Lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungiawab keuangan negara. BPK diharapkan dapat betul-betul mengawal APBN yang menjadi instrument untuk kesejahteraan rakyat. APBN ini harus dikelola dengan sebaikbaiknya, sehingga manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang.

"Peran BPK disini sangat krusial memastikan bahwa APBN itu bukan hanya punya manfaat kepada pembangunan, tapi juga terukur akuntabilitasnya," kata Anis.

Anis juga memberikan apresiasi terhadap nilai kineria BPK pada Tahun 2021 yang meningkat dibandingkan nilai kinerja Tahun 2020 yaitu mencapai angka 102,47 dari sebelumnya pada angka 98.68. Capaian dari tiga Indikator Kineria Utama (IKU) tahun 2021, yaitu: (1) Tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebesar 74.19 persen atau mencapai 101.63 persen dari target sebesar 73 persen; (2) Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil. pemeriksaan dengan nilai 4.25 (sangat memuaskan) atau mencapai 101.19 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,20; (3) Nilai quality assurance reformasi birokrasi dengan nilai 88.17 (A) atau mencapai 108.48 persen dari target vang ditetapkan vaitu 81.28 (A).

"Dengan adanya apresiasi ini, melihat kontribusi dan hasilnya, maka ketersediaan dukungan anggaran sangat penting. Jadi kami sangat mendukung ajuan BPK untuk penambahan anggaran," tutur



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

"Peran BPK disini sangat krusial memastikan bahwa APBN itu bukan hanya punya manfaat kepada pembangunan, tapi juga terukur akuntabilitasnya,"

Anis

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengingatkan tentang komitmen BPK di Tahun 2023 untuk melanjutkan berbagai reformasi dalam melaksanakan salah satu misinya yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia. Namun, Anis juga mengingatkan bahwa Tahun 2023 merupakan tahun politik menjelang 2024.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id fraksi.pks.id | Senin 12 September 2022





### **Legislator PKS Tegaskan** pada Pemerintah: **Pengendalian Inflasi Harus Komprehensif**



Jambi (12/09) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menyampaikan dalam kunjungan kerja Komisi XI di Provinsi Jambi bahwa Pada triwulan II 2022.

inflasi Provinsi Jambi tercatat 7.01% (vov), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 2,83% (yoy) dan 4,35% (vov), 09/09/2022.

"Laiu inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,94% (yoy) dan 7.63% (vov), Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama didorong oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau", kata lunaidi

Junaidi menielaskan implementasi pengendalian inflasi di pelbagai daerah penting melakukan kombinasi antara kebijakan moneter yang bersifat skala nasional dengan kebijakan yang sifatnya nonmoneter misalnya terkait kebutuhan kordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Almunus Institut Pertanian Bogor ini mengungkapkan pengendalian inflasi diharapkan tidak hanya dilaksanakan secara parsial, maksudnya hanva terfokus pada komoditas yang dianggap berkontribusi besar terhadap inflasi. melainkan penting juga melihat kelompok komoditas secara simultan sehingga pengendalian bisa lebih komprehensif.

Laniut Junaidi, suatu komoditas biasanya memilik sifat keterkaitan dengan harga kelompok komoditas

pembentuk inflasi yang memiliki kontribusi pada peningkatan inflasi di kelompok komoditas lainnya.

"Sebagai alternatif, penting dilakukan pengendalian inflasi daerah terutama dalam pengendalian harga kelompok bahan makanan melalui policy yang sifatnya struktural, karena hal ini berkaitan dengan upaya mendorong terjadinya perbaikan dalam pola distribusi pasokan serta dukungan infrastruktur dalam rangka distribusi barang", tutup Junaidi.





Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

"Laju inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,94% (yoy) dan 7.63% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama didorong oleh inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau"





#### FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif







# Taluiah

Majelis Umana' (dewan pembina) Persatuan Ulama Dunia memberikan amanah kepada Dr. Salim Segaf Aljufri untuk memimpin Persatuan Ulama Dunia sampai masa bakti saat ini berakhir













### Walk Out Tolak BBM Naik, Syaikhu: Kami Tak Ingin Rakyat Semakin Menderita



Jakarta (07/09) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021, pada Selasa (6/9/2022).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan atas keputusan pemerintah menaikan harga BBM.

Sebelum meninggalkan ruang paripurna, seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI tampak berdiri dengan mengangkat kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, termasuk Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang juga Anggota Komisi I DPR RI.

Dalam keterangannya, Syaikhu mengungkap sikap yang diambil Fraksi PKS sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM.

"Siang ini saya menghadiri sidang Paripurna DPR RI bersama seluruh anggota Fraksi, kami mengambil sikap walk out dari rapat paripurna, ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang tetap menaikkan harga BBM di tengah penolakan luas oleh masvarakat." ucap Svaikhu.

Syaikhu menuturkan, PKS tidak ingin melihat rakyat semakin menderita akibat kenaikan harga BBM, ia mengatakan kenaikan harga BBM akan berdampak luas di seluruh Indonesia.

"Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM, Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita," kata Syaikhu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi dan melakukan walkout.

"Izin interupsi pimpinan, kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Kami mendukung demo masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto.



H. AHMAD SYAIKHU

"Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM, Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita"

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA





Walk Out dari Rapat Paripurna DPR RI

### Fraksi PKS Tolak Kenaikan Harga BBM dihadapan Pemerintah

KUTIPAN

Jakarta (06/09) — Fraksi PKS DPR RI menyampaikan interupsi terkait dengan penolakan terhadap naiknya Harga BBM Bersubsidi dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, (06/09).

Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM yang jelas-jelas sangat memberatkan masyarakat.

"Pimpinan, izinkan kami menyampaikan sikap PKS yang MENOLAK kebijakan kenaikan harga BBM BERSUBSIDI, karena kami yakin kebijakan tersebut semakin MEMBEBANI kehidupan masyarakat, yang belum pulih benar dari Pandemi Covid-19," tandas Anggota Komisi VII DPR RI ini.

"Secara SIMBOLIK atas sikap penolakan tersebut kami WALK OUT dari Sidang Paripurna DPR RI ini. Sebagai bentuk simpati kami atas sikap masyarakat di luar sana yang juga demo menolak kenaikan BBM bersubsidi. Demikian terima kasih," tutup Mulyanto dilanjutkan dengan berdiri dan keluar dari Rapat Paripurna DPR RI bersama Anggota Fraksi PKS lainnya.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

"Pimpinan, izinkan kami menyampaikan sikap PKS yang MENOLAK kebijakan kenaikan harga BBM BERSUBSIDI, karena kami yakin kebijakan tersebut semakin MEMBEBANI kehidupan masyarakat, yang belum pulih benar dari Pandemi Covid-19,"







### Follow Akun tiktok Fraksi PKS DPR RI

@fraksipksdprri













### Aktivitas di Dapil, Nevi Zuairina <mark>Bagikan</mark> Sembako hingga Seragam



Kabupaten Pasaman (02/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina saat turun lapangan ke daerah pemilihan pada pekan terakhir bulan Agustus 2022, memfokuskan aktivitasnya di Kab. Pasaman.

Mulai dari pembagian paket Sembako, Pembagian seragam ibu-ibu rebana, silaturahmi dengan nasabah PNM, bertemu dengan penerima beasiswa, bertemu dengan kelompok tani dan berdialog dengan asosiasi panjat tebing.

"Semua aktivitas kedapilan ini merupakan upaya untuk merealisasikan visi misi PKS yang dilakukan oleh seluruh dutanya mulai dari legislator hingga kepala daerah yakni melayani rakyat. Lima tahun ini sejak tahun 2020 hingga 2025, PKS ingin Menjadi Partai Islam rahmatan ili 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia", tutur Nevi.

Di kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, ketika legislator Sumbar ini memberikan paket sembako dan tikar untuk masyarakat, ia berpesan agar pemberdayaan sumber kekayaan alam lokal mesti menjadi prioritas mengingat biaya logistik saat ini sudah mulai mahal akibat harga BBM yang tinggi.

Dengan memanfaatkan kekayaan alam di sekitar tempat tinggal, ia berharap masyarakat dapat mengefektifkan dan mengefisienkan biaya hidup.

Sedangkan pada momen pembagian baju seragam untuk ibu-ibu rebana kelompok nagari dan kelompok Al Makwa di nagari petok kecamatan Panti, Pasaman, Nevi Zuairina berharap eksistensi seni dan budaya lokal ia minta terus ditumbuh kembangkan dengan merekrut generasi muda sebagai upaya regenerasi

sehingga kesenian leluhur tetap terjaga di masa depan.

"Alhamdulillah di penghujung kegiatan peringatan kemerdekaan RI ini, saya banyak bertemu dengan berbagai kalangan di Kabupaten Pasaman ini", tutur Nevi.

Pertemuan vang dilakukan oleh Politisi PKS ini Termasuk bertemu dengan para nasabah PNM di nagari Tapus kecamatan Padang gelugur pasaman, Silaturahmi dg orang tua siswa penerima beasiswa PIP tingkat SMP dan kelompok perikanan di jorong sungai manis nagari tarung-tarung Kecamatan Rao Pasaman, Silaturahmi dan serap aspirasi dengan keltan dan kelompok perikanan penerima manfaat pembangunan irigasi P3A sawah loweh nagari lansek kadok kecamatan Rao selatan pasaman, Survei lokasi bantuan irigasi P3A sawah loweh nagari lansek kadok kecamatan Rao selatan Pasaman dan Silaturahmi dg pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia sumbar.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id



### Hj. NEVI ZUAIRINA Anggota Fraksi PKS DPR RI Danil Sumatera Barat II

"Semua aktivitas kedapilan ini merupakan upaya untuk merealisasikan visi misi PKS yang dilakukan oleh seluruh dutanya mulai dari legislator hingga kepala daerah yakni melayani rakyat. Lima tahun ini sejak tahun 2020 hingga 2025, PKS ingin Menjadi Partai Islam rahmatan lil 'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".





### Di Dapil, Aleg PKS Beri Bantuan Pengobatan Anak Penderita Tumor Ganas



Padang Sidempuan (02/08) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis memberikan bantuan kepada ananda Fauzan di Padang Lawas.

"Penanganan medis terhadap Putra pasangan Ambolon Hasibuan dan Tiotna Nasution ini berkat kerjasama yang baik segala pihak. Mulai dari Pemda Padang Lawas yang memfasilitasi orang tuanya agar bersedia dirujuk, berikut bantuan materi," ujarnya.

Pihaknya telah menghubungi Balai Insyaf Medan guna mengkondisikan penanganan terhadap Rahmad Fauzan Hasibuan.

"Alhamdulillah pagi tadi saya Iskan Qolba Lubis Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumut 2 langsung menghubungi Ibu Menteri Sosial agar secara cepat dapat menangani secara Optimal proses penanganan medis dari ananda Rahmad Fauzan Hasibuan yang terkena penyakit tumor di kaki sebelah kanan. Semoga ananda fauzan dapat segera lekas sembuh dan dapat bermanfaat bantuan dari

saya", ungkap Iskan.

Anggota Legislative asal Sibuhuan ini juga mengingatkan pentingnya penanganan medis yang cepat agar meoptimalkan proses penyembuhan dari ananda Fauzan.

"Sava berharap proses penanganan medis dari ananda Fauzan ini dapat secara optimal penanganan nya jangan sampai ada masalah-masalah yang tidak terduga nanti nya. Setelah sava hubungi langsung Ibu Menteri Sosial, saya ingatkan kembali juga dari berbagai pihak yang turut menangani proses medis ini harus secara optimal baik dari kepala dinas sosial padang lawas, DPD PKS Padang Lawas maupun dari Kementerian Sosial yang turut membantu penanganan medis ini, sava harap semua harus bekeria secara cepat dan optimal agar lebih teriamin penanganan nya", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan point penting dari penanganan medis ananda Fauzan.

"Awal mula penyakit ini bersarang ketika ananda Fauzan terjatuh dan tertindih dari sepeda motornya. Lalu menurut keluarga ananda Fauzan ini merasa terus kesakitan di bagian paha sebelah kanan nya, setelah dibawa ke rumah sakit tidak kunjung sembuh akhirnya di diagnosa ada tumor ganas di paha ananda Fauzan ini. Harapan sava setelah kita tangani medis ananda Fauzan tersebut dapat segera mungkin teratasi dan semoga tumor ganas vang bersarang di paha sebelah kanan nya dapat di sembuhkan sehingga ananda Fauzan dapat kembali beraktifitas dengan normal sedia kala kembali. Kepedulian kita semua yang hadir disini termasuk dari sava pribadi mengucapkan semoga lekas pulih sembuh sediakala untuk ananda Fauzan ini pengumpulan dana harapan sava juga dapat membantu meringankan biaya pengobatan ananda Fauzan tersebut". pungkas Iskan mengakhiri.



H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Saya berharap proses penanganan medis dari ananda Fauzan ini dapat secara optimal penanganan nya jangan sampai ada masalah-masalah yang tidak terduga nanti nya"



fraksi.pks.id | Ahad 4 September 2022







### Hadiri Diskusi di Dapil, **Diah Nurwitasari: Harus Ada** Ekuilibrium dalam Usaha **Pertambangan**



#### Bandung (03/09) --- Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Usaha Mineral dan Batu Bara bersama Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, di Trans Convention Center Bandung, Jumat, (02/09/2022).

Seiumlah pengusaha tambang berizin dari berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Barat hadir sebagai peserta dalam bimtek ini. Mereka mendengarkan pemaparan dari beberapa anggota Komisi VII DPR-RI yang hadir sebagai panelis pada acara tersebut.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Barat II. Diah Nurwitasari. dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa hal terkait usaha tambang yang harus diterapkan oleh para

pengusaha.

"Yang pertama adalah faktor knowledge, vaitu pengetahuan tentang hal teknis vang lavak dan harus dilaksanakan agar efektifitas usaha sejalan dengan keamanan dan keselamatan kerja." Ujar Aleg perempuan vang akrab disapa Teh Diah ini membuka pemaparannya.

Yang kedua, imbuh Diah, adalah tata kelola, harus ada kordinasi dan kolaborasi yang baik antara pengusaha dengan dinas atau lembaga terkait.

"Harus ada sinergi yang baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi." Diah melanjutkan.

Hal penting berikutnya, kata Diah, adalah penegakan hukum, dan ini adalah pekerjaan rumah kita bersama.

"Sebagus apapun peraturan atau produk hukum iika tidak ada keberanian kita untuk menegakkan hukum maka yang akan terjadi adalah kerusakan, karena pada prinsipnya aturan dibuat untuk kemaslahatan bersama." tutur Diah menegaskan.

Diah pun mengingatkan tentang faktor lingkungan, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan hidup atau alam yang harus dijaga, karena pada hakikatnya Indonesia dengan segala kekayaan alam nya adalah nikmat dan rizki dari Allah SWT yang harus disyukuri dengan cara dijaga kelestariannya.

"Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah ekuilibrium alias keseimbangan, maksud saya keseimbangan antara usaha dan lingkungan hidup, pengusaha dan pekerja, perusahaan dan masyarakat. pemerintah dan swasta. Semuanya harus dijaga keseimbangannya, karena jika ada yang tidak seimbang maka yang akan terjadi adalah petaka atau bencana. Oleh karena itu marilah kita jaga bersama keseimbangan ini agar kita semua terhindar dari hal-hal.



Dipl.Ing. Hj. DIAH Anggota Komisi VII DPR RI

"Yang harus diperhatikan adalah ekuilibrium alias keseimbangan, maksud saya keseimbangan antara usaha dan lingkungan hidup, pengusaha dan pekerja. perusahaan dan masyarakat, pemerintah dan swasta. Semuanya harus dijaga keseimbangannya, karena jika ada yang tidak seimbang maka yang akan terjadi adalah petaka atau bencana.

yang merugikan kita." Diah menutup pemaparannya. Acara kemudian dilaniutkan dengan sesi diskusi yang sangat interaktif antara

para pengusaha yang hadir dengan para panelis dan perwakilan pemerintah provinsi Jawa Barat





### **Junaidi Auly Salurkan Bantuan PSBI pada Tiga Kelompok UMKM** di Provinsi Lampung

Lampung (01/09) --- Anggota DPR RI komisi XI Fraksi PKS, Junaidi Auly menyalurkan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa 1 Unit Mesin Traktor Roda 4 type 55 hp kepada Poktan Lestari Jaya V, 1 Unit Combine Harvester kepada kelompok tani Maju Jaya, serta unit mesin Laundry Karpet dan pakajan kepada Kelompok Wanita Mandiri.

Bantuan tersebut langsung disalurkan Junaidi Auly kepada kelompok tani dan kelompok wanita mandiri bertempat di Desa Sri Pendowo Kecamatan Sribhawono, Lampung Timur, Selasa, (30/08/2022).

Junaidi berharap, semoga bantuan Alsintan dan mesin Laundry yang disalurkan ini bermanfaat. Mampu mendapatkan hasil yang melimpah dan produktif bagi petani, serta usaha laundry semakin berkembang dan manfaatnya makin dirasakan oleh anggota kelompok.

"Provinsi Lampung merupakan salah satu penyumbang padi dengan kualitas hasil panen yang bagus. Sehingga, dengan bantuan traktor roda 4 dan Combine Harvester ini diharapkan dapat menunjang para petani untuk mencapai hasil panen yang optimal. Begitu juga bagi kelompok usaha wanita mandiri dengan mesin laundry baru ini diharapkan bisa menjadi contoh dan berkembang lebih baik lagi", kata Junaidi.

Aleg PKS ini

menambahkan, dengan adanya dukungan Alsintan dan mesin laundry ini juga diharapkan bisa menambah pemahaman baru dan mendalam bagi petani dan kelompok usaha untuk bagaimana mengelola alat tersebut dengan baik dan benar sebagai alat bantu usaha dan pertanian.

"Yang paling penting bantuan Alsintan dan mesin laundry ini tidak disalah fungsikan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, karena ini untuk kepentingan, kemajuan, dan kesejahteraan kelompok," ujarnya.

Junaidi menegaskan. siapapun boleh mengunakan Alsintan dan mesin laundry. asal sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dalam hal ini, pihak kelompok usaha dan Gapoktan sendiri yang mengatur. bagaimana prosedur dalam sewa pinjamnya", tutup Junaidi.



Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY. M.M.

"Provinsi Lampung merupakan salah satu penyumbang padi dengan kualitas hasil panen yang bagus. Sehingga, dengan bantuan traktor roda 4 dan Combine Harvester ini diharapkan dapat menunjang para petani untuk mencapai hasil panen yang optimal. Begitu juga bagi kelompok usaha wanita mandiri dengan mesin laundry baru ini diharapkan bisa menjadi contoh dan berkembang lebih baik lagi",





### Andi Akmal Pasluddin dan BKIPM Makassar Bagikan 900 Paket Ikan Sehat di Kabupaten Bone

KUTIPAN

Kabupaten Bone (05/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin bekerjasama dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar untuk berdialog dengan masyarakat perikanan sekaligus membagikan paket ikan sehat dan segar.

Kegiatan ini hadir Ratusan masyarakat Kabupaten Bone bagian barat memadati aula kantor Desa Selli Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Kehadiran masyarakat tidak lain menyambut kedatangan Anggota DPR RI Komisi IV Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM bersama rombongan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM Makassar).

Tidak ketinggalan pula para Kepala Desa di wilayah ini serta Sekretaris Kecamatan Bengo Idil Adha A. Passamula didampingi Kapolsek Bengo Iptu Aidil Akbar, S. Sos, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone juga terlihat hadir bersama.

"Alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. dimana dengan program seperti ini akan melibatkan masyarakat sekaligus memberi manfaat yang terasa langsung di tengah rakyat kita. Kegiatannya itu merupakan bagian dari Bulan Mutu Karantina (BMK) yang merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKIPM peduli sosial. Sesuai tema yang diusung 'Dengan semangat Bulan Mutu Karantina, Wujudkan Penjaminan Ikan Sehat dan Bermutu', "Urai Akmal.

Politisi PKS ini mengapresiasi telah selama kurang lebih 7 tahun program ini terlaksana cukup baik. bahkan setiap tahunya Andi Akmal Pasluddin selaku anggota DPR komisi IV terus memberikan dukungan hingga dapat dirasakan masyarakat luas di Sulsel.

"Ini terselenggara atas dukungan dan support yang sangat besar sehingga kementerian kelautan khususnya BKIPM dapat terfasilitasi dengan baik. Saya harap, program ini terus berlanjut, bahkan titik kegiatannya diperbanyak menjangkau seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ," Ujar Akmal berharap.

Sebagai anggota dewan, Andi Akmal Pasluddin tentu sudah banyak berkontribusi kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan begitu juga program-program berbasis lainnya dan semuanya itu gratis untuk kesejahteraan masyarakat selama duduk di kursi DPR.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

nggota Fraksi PKS DPR RI Ďapil Sulawesi Selatar

"Alhamdulillah kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, dimana dengan program seperti ini akan melibatkan masyarakat sekaligus memberi manfaat yang terasa langsung di tengah rakyat kita. Kegiatannya itu merupakan bagian dari Bulan Mutu Karantina (BMK) yang merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKIPM peduli sosial





### Tolak Kenaikan Harga BBM, Anggota FPKS Kawal Penyaluran BLT BBM agar Tepat Sasaran



Jakarta (08/09) — Pemerintah mengalokasikan anggaran alih subsidi untuk bantalan sosial sebesar Rp 24,17 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp12,96 triliun dialokasikan untuk program BLT BBM bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk lebih jeli dalam penyaluran BLT BBM.

Berkaca pada penyelenggaraan program bansos selama pandemi, imbuhnya, masalah exclusion dan inclusion error menjadi salah satu permasalahan mendasar yang membuat bantuan tidak tepat sasaran.

"Isu yang sering dikeluhkan adalah soal akurasi data penerima manfaat bansos. Misalnya, ada yang berhak menerima bansos, tetapi dia tidak memperolehnya karena alasan tidak terdata. Begitupun

sebaliknya, ada yang tidak berhak alias mampu, tetapi dia justru menerima bansos. Ini yang menjadi salah satu concern utama DPR terhadap Kemensos terkait pentingnya pembenahan DTKS sehingga kami pernah mengusulkan pencanangan tahun 2021 sebagai Tahun Pendataan," kata Bukhori di Jakarta, Rabu (07/09/2022).

Anggota Komisi Sosial DPR ini mengatakan, dana bansos sebagai kompensasi atas kenaikan BBM masih terbilang kecil. Dari anggaran subsidi energi yang disebut pemerintah mencapai Rp502 triliun, ternyata hanya Rp24,17 triliun

atau 4,8 persennya saja yang dialokasikan untuk tiga program bantalan sosial, yakni bantuan subsidi upah, Dana Transfer Umum, serta BLT yang akan dibagikan kepada 20,65 juta KPM dengan total anggaran sebesar Rp 12.96 triliun.

"Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, apakah dana Rp 24,17 triliun itu akan mampu menjadi bantalan sosial terkait dengan kenaikan BBM. Jawaban saya, ya harus dipikir bersama karena menurut saya angka tersebut tidak masuk akal. Jika dari Rp502 triliun hanya dialokasikan Rp24,17 triliun atau 4,8 persennya saja, janganlah terlalu digembar-gemborkan," kritiknya.

Kedua, lanjutnya, terkait data 20,65 juta KPM ini sebenarnya adalah data yang selama ini sudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako yang kemudian tinggal ditambah

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Persoalan yang akut sampai hari ini adalah apakah data penerima bansos atau KPM dari BPNT dan PKH itu benar-benar 100 persen sudah memenuhi kriteria orang yang berhak menerima? Jawabannya tidak, meskipun jumlah yang tidak memenuhi kriteria itu belum bisa dipastikan. Tetapi perkiraan saya, masih akan ditemukan individu-individu yang sebenarnya tidak berhak menerima, tetapi menerima BLT ini."

### PROGRAM JNGGULAN FRAKSI PKS DPR RI





Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada genarasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.









fraksi.pks.id | Senin 5 September 2022





### Peduli Peningkatan Pendidikan di Sumbar, Nevi Perjuangkan Beasiswa untuk Mahasiswa



Padang (05/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, merealisasikan perjuangan KIP-K untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di jalur pendidikan tinggi.

Puluhan mahasiswa penerima beasiswa berdialog dengan politisi PKS ini untuk melakukan ramah tamah dengan suasana serius tapi santai.

Nevi menjelaskan, bahwa (KIP-K) Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan program pemerintah untuk membantu mahasiswa agar mendapatkan biaya hidup dan kuliah secara gratis. KIP Kuliah ini akan memberi biaya hidup ke mahasiswa tiap bulan.

"Saya meminta, kepada para mahasiswa penerima KIP-K ini agar belajar sungguhsungguh, dengan target nilai yang sangat memuaskan atau lebih, dengan waktu sesuai jadwal kelulusan. Tapi yang lebih penting adalah, mahasiswa penerima beasiswa mesti dapat membuktikan, karya-karya yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, minimal untuk masyarakat Sumatera Barat", tutur Nevi.

Legislator PKS ini mengatakan, bahwa pemerintah ada harapan besar pada penerima beasiswa agar nantinya di masa depan, mereka sukses baik dari segi akademik maupun tingkat kehidupannya.

"Dengan suksesnya mereka, diharapkan juga akan memberi manfaat buat negara atau daerahnya sebagai pelopor masyarakat dalam pembangunan." ungkapnya.

Anggota DPR RI komisi VI ini juga menambahkan, bahwa penerima beasiswa kuliah ini tidak semua orang mendapatkannya karena memang jangkauan APBN tidak dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

Yang terpilih dan memiliki ketidak sanggupan dalam membiayai pendidikanlah yang berhak sehingga kesempatan untuk menempuh pendidikan di jalur perguruan tinggi ini mesti dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya dengan cara serius dalam pembelajaran dan pendidikan.

"Sava berharap SDM Sumatera Barat dimasa depan dapat semakin meningkat dengan kualitas pendidikan mayoritas lulusan perguruan tinggi, Beasiswa Kuliah ini merupakan upaya untuk pemerataan pendidikan di kalangan yang kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi. Terima kasih wakil rektor I, wakil rektor II dan Ketua program studi (prodi) universitas adzkia yang hadir pertemuan silaturahmi ramah tamah penerima beasiswa kuliah", tutup Nevi Zuairina dalam sambutannya



H. JOHAN ROSIHAN, S.T

"Saya berharap SDM Sumatera Barat dimasa depan dapat semakin meningkat dengan kualitas pendidikan mayoritas lulusan perguruan tinggi. Beasiswa Kuliah ini merupakan upaya untuk pemerataan pendidikan di kalangan yang kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi







### Pasca Kenaikan Harga **BBM. Hermanto Hantarkan Ribuan Paket Sembako** untuk Nelayan Sumbar



Di Padang, sembako diserahkan di lokasilokasi komunitas nelayan di Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Gates Kecamatan Lubuk Begalung, Pantai Manis Kecamatan Padang Selatan, Pantai Purus Kecamatan Padang Barat, Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara dan terakhir di Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah.

Padang (12/09) - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto mengadakan roadshow menghantarkan 1000 paket sembako untuk para nelavan Sumatera Barat, Paketpaket sembako tersebut merupakan bantuan pemerintah dalam kegiatan Bakti Nelayan di Sumatera Barat.

"Kegiatan Bakti Nelayan di Sumatera Barat tahun ini dilaksanakan tidak lama setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Semoga kegiatan ini bisa menjadi pelipur lara atas kesedihan para nelayan akibat

kenaikan BBM belum lama ini." uiar Hermanto dalam sambutannya dihadapan para nelayan dalam rangkaian kegiatan Bakti Nelayan yang dilaksanakan Jumat-Sabtu (9-10/09/2022) lalu.

Kegiatan Bakti Nelavan. kata Hermanto, sekaligus merupakan simbol bahwa negara hadir di tengah komunitas nelavan.

"Di Sumatera Barat, kegiatan Bakti Nelavan dilaksanakan sejak tahun lalu. Kita upayakan kegiatan ini dilaksanakan berkelanjutan, terlaksana juga

di tahun-tahun mendatang." uiar legislator dari FPKS DPR RI dari Dapil Sumbar I ini.

Kegiatan Bakti Nelayan diawali dengan acara seremoni di Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Selaniutnya paket sembako disalurkan kepada nelayan laut di Padang serta nelayan danau di Tanah Datar dan Solok.

Di Padang, sembako diserahkan di lokasi-lokasi komunitas nelavan di Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Gates Kecamatan Lubuk Begalung, Pantai Manis Kecamatan Padang Selatan, Pantai Purus Kecamatan Padang Barat, Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara dan terakhir di Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah.

Di Tanah Datar, sembako disalurkan di Batu Limbak Kecamatan Rambatan dan Malalo Kecamatan Batipuh Selatan.

Di Kabupaten Solok sembako disalurkan di Paninggahan Kecamatan Juniung Sirih. Sumani Kecamatan X Koto Singkarak dan Danau Diatas Kecamatan Hiliran Gumanti.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Di Sumatera Barat, kegiatan Bakti Nelayan dilaksanakan sejak tahun lalu. Kita upayakan kegiatan ini dilaksanakan berkelanjutan, terlaksana juga di tahuntahun mendatang,"







### Ikuti Flashmob Tolak Kenaikan Harga BBM, Nur Azizah: PKS Siap Berdiri Bela Rakyat Kecil



Depok – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A, ikuti Aksi Flashmob PKS menolak kenaikan harga BBM. Saat ditemui di lampu Merah Tol Cisalak Depok pada Sabtu (10/9), Nur Azizah menyebutkan

Flashmob ini bukan hanya aksi biasa, namun bentuk protes keras yang dilakukan oleh seluruh kader dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia.

"Tidak hanya sekedar aksi biasa, kami menunjukan bentuk keprihatinan kami melalui aksi nyata. Seluruh kader dan simpatisan PKS se Indonesia hari ini serempak turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang tidak adil, dan sangat menyengsarakan rakyat banyak", tegas Nur Azizah.

la menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini, akan berdampak panjang, dan akan melahirkan semakin banyak kemiskinan dan penganggguran, apalagi saat ini Indonesia belum benar-benar pulih dari masa Pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus
konsisten dengan slogan yang
digaungkan ketika hari
kemerdekaan beberapa waktu
lalu. 'pulih lebih cepat bangkit
lebih kuat', tapi dengan
kebijakan yang saat ini baru
ditetapkan, sangat tidak sejalan
dengan apa yang dicita-citakan
tersebut", papar Nur Azizah.

Pada kesempatan ini Nur Azizah turut menjelaskan, PKS hadir tidak sekedar memprotes tanpa data dan fakta. "Kami di Fraksi PKS sudah melakukan kajian mendalam terkait dampak kenaikan harga BBM ini. Tim kapakaran di Fraksi PKS juga menemukan beberapa catatan terkait ketidaksiapan pemerintah dalam membaca peta kondisi rakyat Indonesia saat ini", kata Nur Azizah.

Pertama, Dasar Hukum dari kebijakan ini kurang kuat. Hal ini bisa dilihat pemerintah masih menggunakan Perpres dalam melakukan perubahan APBN jelas sangat lemah, karena APBN sendiri merupakan produk UU yang dibahas dan disahkan dalam sidang paripurna DPR.

Kedua, Transparansi data dan informasi yang lemah. Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar tidak bisa dilepaskan dari Outlook belanja subsidi energi sebesar Rp502,4 triliun. Pemerintah dalam setiap penjelasannya, tidak pernah transparan menjelaskan munculnya angka Rp502,4 triliun.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Tidak hanya sekedar aksi biasa, kami menunjukan bentuk keprihatinan kami melalui aksi nyata. Seluruh kader dan simpatisan PKS se Indonesia hari ini serempak turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang tidak adil, dan sangat menyengsarakan rakyat banyak",



fraksi.pks.id | Selasa 6 September 2022







### Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, **Aus Hidayat Nur Ajak Masyarakat Berpartisipasi**



Balikpapan (06/09) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menggelar Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Swiss-bel Hotel Balikpapan.

Kegiatan yang merupakan keriasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini dihadiri lebih dari 100 peserta.

"Saya pernah mengadakan acara juga dengan Bawaslu di Balikpapan pada tahun 2020. tapi saat itu temanya evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Sedangkan kali ini yang akan kita bahas adalah Persian untuk Pemilu yang akan datang," buka Anggota Fraksi PKS tersebut.

Kegiatan bersama Bawaslu Kalimantan Timur ini mengangkat tema 'Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bawaslu Tegakkan Keadilan'.

Selain memaparkan tugastugas Bawaslu, Anggota Komisi Il tersebut juga mengulas isu-isu krusial terkait Pengawasan Pemilu, Mulai dari

pemutakhiran data pemilih dan akses datanya, penegakan hukum, hingga pelaksanaan Pemilu di propinsi baru Papua maupun di IKN yang belum diputuskan teknisnya.

Pada kesempatan ini. Aus Hidavat Nur mengajak peserta untuk terlibat aktif dalam Pengawasan Pemilu.

"Dengan sosialisasi ini kita berharap masyarakat bisa meningkatkan partisipasinya, bukan hanya turut memilih namun juga turut mengawasi," pesan Wakil Rakyat Kalimantan Timur tersebut.

Aus mencontohkan beberapa peran partisipatif vang bisa dilakukan oleh masvarakat.

"Bawaslu bisa membentuk Forum Warga yang merupakan

ieiaring komunitas untuk membantu tugas-tugasnya. Selain itu bisa dibuat Poiok Pengawasan di masyarakat, Kampung Pengawasan Pemilu, atau Pengabdian Masyarakat dari Kampus, bahkan bisa berupa Saka Adhvasta Pemilu vang melibatkan gerakan Pramuka," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan tanya jawab. Beberapa peserta meminta agar pelaksanaan Pemilu 2024 lebih dipersiapkan dengan maksimal dan terhindar dari potensi kecurangan.

"Jangan sampai kotaknya pun dari kardus seperti Pemilu 2019." wanti salah seorang peserta.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Propinsi Kalimantan Timur Galeh Akbar Tanjung dan segenap pengurus Bawaslu Kota Balikpapan ini ditutup tepat menjelang Zuhur.



#### KH. AUS HIDAYAT NUR

"Bawaslu bisa membentuk Forum Warga yang merupakan jejaring komunitas untuk membantu tugas-tugasnya. Selain itu bisa dibuat Pojok Pengawasan di masyarakat, Kampung Pengawasan Pemilu, atau Pengabdian Masyarakat dari Kampus, bahkan bisa berupa Saka Adhyasta Pemilu yang melibatkan gerakan Pramuka,"







### Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy, 400 Wirausahawan Muda Siap Songsong Era Digital



Jakarta (01/09) --- Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari membuka pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA)

Bagi Pelaku Usaha Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Dan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (BPPTIK) Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian (BBPSDMP) Kementerian Kominfo.

Kegiatan ini dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda yaitu di Hotel Paragon, Hotel Sunan dan Hotel Cokro Klaten secara serentak pada Selasa-Rabu 30-31 Agustus 2022.

Sebanyak 400 orang wirausahawan muda mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama dan sinergitas antara Anggota DPRRI dengan Kementerian Kominfo yang menjadi stakeholder komisi I.

Kepala BBPSDMP Kominfo yang diwakili oleh Ketua Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, Noor Iza menyampaikan bahwa pelatihan DEA merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia unggul untuk mempercepat transformasi digital bidang kewirausahaan dalam rangka meningkatkan ekonomi digital.

Selain itu, pelatihan ini dilaksanakan untuk membantu wirausahawan konvensional bisa beralih ke digital sesuai perkembangan teknologi, dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

"Melalui pelatihan ini juga, diharapkan para peserta pelatihan bisa menjadi pelopor untuk membangun kebiasaan berinternet sehat, menggunakan media internet sebagai media untuk belajar, berbisnis dan beribadah," ungkapnya.

Kharis dalam sambutannya menyampaikan bahwa membangun SDM perlu fokus, membutuhkan konsentrasi dan usaha maksimal.

"Membangun SDM itu tidak sama dengan membangun BTS yang segera terwujud setelah dipasang, tetapi membangun SDM adalah mempersiapkan alih generasi masa depan. Di pundak mereka-mereka inilah nasib masa depan bangsa dan masyarakat Indonesia. Maka harus direncanakan dan dikerjakan dengan sungguhsungguh" ungkapnya.

Lebih lanjut kharis memaparkan bahwa DEA merupakan satu stimulus, satu pancingan, satu starter saja untuk memasuki dasar-dasar di era di digital.

Selengkapnya kunjunqgi fraksi.pks.id



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
Anagota Fraksi PKS DPR RI Daoii Jawa Tengah V

"Membangun SDM itu tidak sama dengan membangun BTS yang segera terwujud setelah dipasang, tetapi membangun SDM adalah mempersiapkan alih generasi masa depan. Di pundak mereka-mereka inilah nasib masa depan bangsa dan masyarakat Indonesia. Maka harus direncanakan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh"







FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



### Salwikan ASPIRASI ANDA DI HARI ASPIRASI FRAKSI PKS DPR RI

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form: https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/





Terima Aspirasi PP Himpaudi,

### Aleg PKS Janji Perjuangkan Kesejahteraan Guru PAUD dan Kualitas Pendidikannya

KUTIPAN

Jakarta (09/09) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes dan Mustafa Kamal, menerima aspirasi dari PP Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Himpaudi meminta kepada Fraksi PKS untuk turut memperjuangkan revisi UU Sisdiknas guna masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022.

Mengingat, menurut Himpaudi, perubahan ini dinilai sangat penting untuk dilakukan, khususnya demi meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru PAUD, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini itu sendiri.

Menanggapi aspirasi ini, Fahmy Alaydroes menyatakan bahwa PKS akan mengawal agar proses pembahasan RUU Sisdiknas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dari hulu hingga hilir. "Masukan dari Himpaudi akan kami serap, kami pelajari, dan akan kami jadikan bahan untuk memastikan apabila RUU Sisdiknas ini nantinya resmi diajukan oleh Pemerintah, kita tidak akan biarkan ada pasal yang melemahkan posisi guru Paud dan pendidikan anak usia dini. Kita pastikan ada penguatan", ungkap Fahmy.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa posisi dan peran pendidikan anak usia dini sangat vital bagi pembangunan bangsa di masa depan.

"Khusus mengenai PAUD, lembaga pendidikan ini memiliki posisi yang luar biasa. Kita mengetahui tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh pendidikan di masa usia dini. Apa yang diperjuangkan Himpaudi sebenarnya adalah bentuk pengawalan terhadap harkat dan martabat bangsa. Apabila pendidikan masa dini diperhatikan secara baik, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang hebat di masa yang akan datang", ujarnya lagi.

Senada dengan Fahmy, Mustafa Kamal yang turut hadir dalam forum daring tersebut, menyatakan bahwa Fraksi PKS akan serius memperjuangkan aspirasi guru dan tenaga pendidiki di RUU Sisdiknas.

"Kami akan mengawal ini. Belakangan, kemunculan RUU Sisdiknas ini banyak menuai polemik dan kontroversi. Tentu, itu adalah akibat dari proses yang terburu-buru dan kurang melibatkan seluruh pihak. Masukan dan saran perbaikan dari Himpaudi akan kami terima dan jadikan bahan untuk menyusun produk legislasi terkait pendidikan yang lebih baik", pungkas Mustafa



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

"Masukan dari Himpaudi akan kami serap, kami pelajari, dan akan kami jadikan bahan untuk memastikan apabila RUU Sisdiknas ini nantinya resmi diajukan oleh Pemerintah, kita tidak akan biarkan ada pasal yang melemahkan posisi guru Paud dan pendidikan anak usia dini. Kita pastikan ada penguatan"





### Terima Aspirasi Generasi Muda Prodewa, Netty Ajak Kolaborasi Bangun Demokrasi

KUTIPAN

Jakarta (06/09) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menerima kunjungan dan aspirasi dari perwakilan Progressive Democracy Watch,

dalam program Hari Aspirasi Fraksi PKS DPR RI, di Ruang Meeting FPKS, Senayan, Jakarta, pada Selasa (06/09).

Dalam kesempatan itu, Netty mengapresiasi insiatif generasi muda untuk terlibat dalam pengawalan iklim demokrasi di Indonesia.

"Secara pribadi, saya sangat mendukung generasi muda yang aktif untuk berperan dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik ke depan", ungkap Netty.

la pun mengajak Progressive Democracy Watch untuk terus memproduksi kajian-kajian yang mencerdaskan bagi rakyat, sekaligus menyelenggarakan acara yang bisa mengajak generasi muda lain untuk merawat demokrasi.

"Teruslah mengedukasi masyarakat untuk menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang melek politik, dan warga negara yang paham esensi substantif demokrasi, guna menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera", ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat ini pun menyebut bahwa Fraksi PKS terbuka untuk berkolaborasi dengan para pemuda.

"Fraksi PKS senantiasa siap untuk memberikan support bagi generasi muda untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik di republik kita tercinta ini", pungkasnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Teruslah mengedukasi masyarakat untuk menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang melek politik, dan warga negara yang paham esensi substantif demokrasi, guna menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera"





### Naiknya Harga BBM Bersubsidi, Presiden PKS Terima Aspirasi Ratusan Pengemudi Ojol

KUTIPAN

Jakarta (08/09) — Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Daring (Speed) mendatangi kantor DPP PKS, di Jakarta, pada Kamis (8/9/2022).

Kedatangan pengemudi ojol disambut langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang langsung melakukan diskusi interaktif dengan para pengemudi ojol.

"Kenaikan harga BBM tentu tentu memberatkan bagtara driver ojol apalagi sebagian besar teman-teman ojol memakai pertalite yang memakai bensin bersubsidi yang juga alami kenaikan," ucap Syaikhu.

la mengatakan dari hasil diskusi dengan para pengemudi ojek online, mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM karena dampaknya sangat terasa di tengah-tengah masyarakat.

"Hasil diskusi tadi kita ingZin meminta kepada

Pemerintah agar melihat kondisi dibawah terutama dari para ojol ini yang merasakan dampak langsung terhadap kenaikan harga BBM, kita meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan untuk menaikkan harga BBM," kata dia.

Selain itu Syaikhu juga ingin mendengar keluh kesah yang dialami para pengemudi ojek online yang terkena dampak langsung terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Saya ingin mendengar secara langsung dari temanteman apa yang menjadi persoalan di sekitar ojol ini," tutur Syaikhu.

Sementara itu dalam diskusi yang berlangsung para pengemudi ojol menyampaikan aspirasi serta ucapan terima kasih atas sikap PKS menolak kenaikan harga BBM.

"Terimakasih kepada PKS vang telah menerima kita disini untuk mendengar keluhan dari oiol pertama ini jelas berkaitan dengan kenaikan BBM sangat terasa bagi kami terdampak. dulu kami bisa mengisi bensin 40-50 ribu pertalite dengan pemasukan 200 ribu maksimal itu sebelum BBM naik Bagaimana utk sekarang sekali isi 35 rb saia tidak cukup dengan pendapatan 100 ribu belum makan belum yang kita apresiasi PKS tetap bersuara di DPR menolak kenaikan harga BBM." kata Mule driver oiol dari Depok.

Para ojol juga berharap ada harga khusus bagi pengendara ojek online dalam membeli BBM bersubsidi.

"Terima kasih buat PKS terutama Presiden PKS atas waktu dan tempatnya yang ingin saya sampaikan pertama mohon diperjuangkan untuk ojol ada harga khusus agar dapet harga khusus gak harus 10 ribu," ucap Sahrul pengemudi ojek online asal Jakarta Timur.



"Terima kasih buat PKS terutama Presiden PKS atas waktu dan tempatnya yang ingin saya sampaikan pertama mohon diperjuangkan untuk ojol ada harga khusus agar dapet harga khusus gak harus 10 ribu





Website fraksi.pks.id

Instagram fraksipksdprri

Fraksi PKS DPR RI

PKSTV DPR RI

## Nantikan Setiap Pekan